



PT BANK
PERKREDITAN RAKYAT

SINAR GARUDA

LAPORAN

TAHUNAN

2

0

2

2

Pusat : Jl. Singosari Ruko No. 16 F-G, Karang Kidul, Magelang. Telp/Fax (0293) 314 639
Cabang : Ruko Metro Square Blok D-03, Mertoyudan, Magelang. Telp/Fax (0293) 327 311
Kas : Ruko Kawedanan Blok D-01, Salaman, Magelang. Telp/Fax (0293) 321 7277

Laporan Tahunan 2022

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyusun Laporan Tahunan PT BPR Sinar Garuda Prima Tahun Buku 2022. Laporan ini merupakan rangkuman atas hasil kerja kami selama tahun 2022.

Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih atas semua dukungan sehingga kami bisa melewati dan menyelesaikan tugas dan tanggungjawab kami di tahun 2022 dengan lancar. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada :

1. Otoritas Jasa Keuangan Semarang khususnya, berkat bimbingan dan masukannya. Sehingga di tahun 2022 kemarin, banyak perubahan yang sudah kami lakukan. Meskipun masih ada beberapa hal yang masih perlu kami tingkatkan dan sempurnakan.
2. Ibu Erlina Sari Sutono dan Bapak Yosef Hening Krida Murdanto selaku komisaris yang telah memberikan bimbingan, sumbangan ide, pemikiran dan masukan kepada kami sehingga kinerja kami di tahun 2022 bisa berjalan dengan baik.
3. Para pemegang saham PT BPR Sinar Garuda Prima yang telah mempercayakan pengelolaan banknya kepada kami.
4. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah memberikan masukan dan saran dalam penyusunan Laporan Tahunan PT BPR Sinar Garuda Prima.

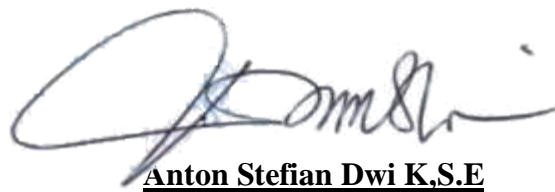
Kami menyadari bahwa ada kemungkinan penyusunan Laporan Tahunan ini masih jauh dari memuaskan dan masih terdapat beberapa kelemahan serta belum bisa memenuhi standart penulisan Laporan Tahunan. Untuk itu, kami sangat mengharapkan adanya saran dan masukan membangun demi sempurnanya laporan-laporan kami selanjutnya.

Magelang, 27 April 2023

PT BPR Sinar Garuda Prima



Dra. Erlina Sari Sutono
Komisaris Utama



Anton Stefian Dwi K.S.E
Direktur Utama

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I	4
INFORMASI UMUM.....	4
1. Kepengurusan	4
2. Kepemilikan.....	5
3. Perkembangan usaha BPR.....	6
4. Strategi dan Kebijakan Manajemen	7
5. Laporan manajemen	8
BAB II.....	16
LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN	16
1. Laporan Posisi Keuangan	16
2. Laporan Laba Rugi.....	17
3. Laporan Arus Kas.....	19
4. Laporan Perubahan Ekuitas	20
5. Catatan Atas Laporan Keuangan.....	20
BAB III.....	30
OPINI AKUNTAN PUBLIK	30
BAB IV	31
PENGUNGKAPAN LAPORAN TAHUNAN.....	31
1. Penjelasan Atas Pos - Pos Neraca	31
2. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Laba Rugi	35
3. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Arus Kas.....	37
4. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	37
5. Penjelasan Atas Pos-Pos Komitmen Dan Kontijensi	37
BAB V	39
PENGUNGKAPAN (DISCLOSURE)	39
1. Transaksi Hubungan Istimewa.....	39
2. Perubahan akuntansi dan koreksi kesalahan.....	39

Laporan Tahunan 2022

3. Pengungkapan komitmen dan kontijensi.....	39
4. Perkembangan Standar akuntansi dan Pedoman Akuntansi BPR.....	40
5. Peristiwa setelah tanggal neraca	40
BAB VI	41
SURAT KOMENTAR (<i>MANAGEMENT LETTER</i>)	41
LAMPIRAN	51
Profil Komisaris	52
Profil Komisaris	53
Profil Direksi	54
Profil Direksi	55
Profil Pejabat Eksekutif Kepatuhan	56
Profil Pejabat Eksekutif Manajer Bisnis	56
Profil Pejabat Eksekutif Pimpinan Kantor Cabang.....	56
Profil Pejabat Eksekutif Manajer Operasional	57
Profil Pejabat Eksekutif Audit Internal	57
Struktur Organisasi	58
Daftar Karyawan.....	60

BAB I INFORMASI UMUM

1. Kepengurusan

PT BPR Sinar Garuda Prima didirikan berdasarkan Akta Notaris Hendrik Lambertus Hans Verhoeven, SH, dengan Nomor 17 tertanggal 12 Desember 1992, dengan Berita Negara Republik Indonesia No. 54 Tambahan Nomor 3039 dan mendapat persetujuan dan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C2-2069.HT.01.01-Th 1993 dikeluarkan pada tanggal 08 April 1993 serta ijin Menteri Keuangan dengan Surat Keputusan No. Kep/178/KM.17/1993 tertanggal 28 Agustus 1993. Anggaran dasar PT. BPR. Sinar Garuda telah mengalami beberapa kali perubahan, pada tahun 2007 bank diakuisisi dan terjadi jual beli saham dan sudah disahkan oleh Notaris M.V. Endang Kusastuti Budi Santoso, SH dengan akta notaris No. 15 tertanggal 14 Mei 2007, dengan demikian bank mengalami perubahan dalam kepemilikan saham. BPR diakuisisi oleh pemilik baru sesuai persetujuan Bank Indonesia No.8/2594/DPBPR/PLBPR/Sm tertanggal 15 Desember 2006.

Kantor PT BPR Sinar Garuda Prima saat ini ada 3 (tiga) kantor yaitu:

Jenis Kantor	Alamat	No. Telp/Fax
Kantor Pusat	Jl. Singosari Ruko No. 16 F dan G, Kelurahan Rejowinangun Selatan, Magelang Selatan, Kota Magelang.	(0293) 314 639
Kantor Cabang	Ruko Metro Square Blok D.03 Jl. Mayjend Bambang Soegeng, Mertoyudan, Magelang.	(0293) 327 311
Kantor Kas	Ruko Kawedanan blok D-1, Salaman, Magelang	(0293) 321 7277

Anggaran Dasar Perseroan Terbatas sudah disesuaikan dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan sudah disahkan oleh Notaris M.V. Endang Kusastuti Budi Santoso, SH dengan No. 11 tertanggal 10 Maret 2008. Susunan Pengurus, Per 31 Desember 2022 adalah sesuai dengan Pengangkatan Pengurus PT BPR Sinar Garuda Prima yang telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan No. Surat S-522/KR.0313/2021 tanggal surat 18 November 2021.

Laporan Tahunan 2022

No.	Jabatan	Nama	Masa Jabatan
1.	Komisaris Utama	Dra. Erlina Sari Sutono	06/07/2018 – 06/07/2023
2.	Komisaris	Yosef Hening Krida Murdanto	01/10/2021 – 01/10/2026
3.	Direktur Utama	Anton Stefian Dwi Kristanto, S.E	06/06/2018 – 06/06/2023
4.	Direktur dan Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	Satriya Sambodo, S.E, MM	06/06/2018 – 06/06/2024

*) Profil terlampir

2. Kepemilikan

Modal dasar Bank sampai dengan akhir Desember tahun 2022 adalah sebesar Rp.15.000.000,- ribu. Hal ini sesuai dengan Akta Notaris No. 25 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas "PT. Bank Perkreditan Rakyat Sinar Garuda Prima" Disingkat "PT BPR Sinar Garuda Prima" tertanggal 27 Juni 2019 yang dibuat dihadapan notaris Evie Junani, SH. notaris di Kota Magelang dan telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0038119.AH.01.02.Tahun 2019 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bank Perkreditan Rakyat Sinar Garuda Prima tertanggal 17 Juli 2019 serta persetujuan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-283/KR.0313/2019 Perihal: Persetujuan Perubahan Modal Dasar tertanggal 31 Juli 2019.

Pada Tahun 2018 terdapat peningkatan modal disetor dan pengeluaran saham dalam simpanan. Hal ini sesuai dengan Akta Notaris No. 01 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. Bank Perkreditan Rakyat Sinar Garuda Prima" Disingkat "PT BPR Sinar Garuda Prima" tertanggal 03 Desember 2018 yang dibuat dihadapan notaris Evie Junani, SH. notaris di Kota Magelang dan telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.03-0273875 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Perkreditan Rakyat Sinar Garuda Prima tertanggal 11 Desember 2018 serta persetujuan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-579/KR.0313/2018 Perihal: Persetujuan Penambahan Modal Disetor tertanggal 14 November 2018. Dalam ini menyetujui peningkatan modal yang ditempatkan dan disetor dan pengeluaran saham dalam simpanan yang semula Rp 7.000.000.000,- (Tujuh milyar rupiah) menjadi Rp 8.000.000.000,- (Delapan milyar rupiah).

Laporan Tahunan 2022

Komposisi kepemilikan dan jumlah masing-masing modal yang disetor oleh pemilik adalah sebagai berikut :

No	Nama Pemilik	% Saham	Lembar Saham	Jumlah
1.	RY. Kristian Hardianto, S.H	35	2.800	2.800.000
2.	Anton Stefian Dwi Kristanto,SE	20	1.600	1.600.000
3.	Drs. Soerjono Walujo	15	1.200	1.200.000
4.	Dra. Nyauw Farida, Akt	15	1.200	1.200.000
5.	Dra. Erlina Sari Sutono	15	1.200	1.200.000
JUMLAH		100	8.000	8.000.000

3. Perkembangan usaha BPR

a) Non Performing Loan

(dalam ribuan rupiah)

Kolektibilitas	31/12/2021			31/12/2022		
	Jml. Rek	Baki Debet	%	Jml. Rek	Baki Debet	%
Lancar (L)	723	16.722.280	76,14	787	16.893.654.275	74,30
Dalam Pengawasan (DP)	50	1.842.586	8,39	83	542.757.275	2,39
Kurang Lancar (KL)	3	79.784	0,36	7	2.679.177.005	11,78
Diragukan (D)	3	460.523	2,10	0	0	0,00
Macet (M)	13	2.856.666	13,01	11	2.621.188.491	11,53
Total	792	21.961.838	100	888	22.736.777.046	100
Non Performing Loan (NPL)	19	3.396.972	15,47	18	5.300.365.496	23,31
Kenaikan / Penurunan				-1	1.903.393.384	7,84

NPL pada periode 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar 7,84% dengan pengurangan 1 user dengan baki debit Rp 1.903.393.384,- .

b) Perkembangan usaha yang berpengaruh secara signifikan terhadap BPR

Selama periode 2022 tidak terdapat penambahan atau pengurangan kegiatan usaha.

Rasio Keuangan

No	Keterangan	Tahun	Tahun
		2022	2021
1	KPMM	84,78	92,44
2	KAP	10,21	8,63

Laporan Tahunan 2022

3	PPAP	100,00	100,00
4	NPL (neto)	21,71	9,15
5	ROA	2,08	1,35
6	BOPO	84,10	88,15
7	LDR	60,15	58,46
8	Cash Ratio	8,57	17,68

4. Strategi dan Kebijakan Manajemen

Strategi dan Kebijakan Manajemen yang dilakukan bank PT. BPR. Sinar Garuda Prima selama tahun 2022 adalah sebagai berikut :

A. Strategi Pemasaran

- 1) Target funding adalah target bank dalam mencapai penghimpunan dana bank. Salah satu cara mencapai target pemasaran, terutama dalam hal penghimpunan dana (tabungan dan deposito) yaitu dengan
 - a) melakukan pendekatan kepada calon-calon penabung dan deposan potensial di sekitar Kota Magelang dan Kabupaten Magelang.
 - b) Memberikan pelayanan terbaik kepada para deposan dan penabung yang sudah ada.
 - c) Meningkatkan kinerja bank, sehingga semakin menambah kepercayaan masyarakat untuk menanamkan dananya di BPR.
 - d) Tetap mempertahankan pelayanan dan menjalin hubungan baik dengan penabung dan deposan, sehingga diharapkan dapat memberikan dan mempertahankan kepercayaan masyarakat.
 - e) Tetap melakukan promosi dan penawaran kepada calon penabung dan deposan.
- 2) Target bank yang kedua adalah pencapaian target penyaluran dana dalam bentuk kredit. Beberapa langkah yang sudah kami ambil untuk mempertahankan outstanding adalah :
 - a) Menjaga hubungan baik dengan nasabah lancar dan menjaga loyalitas nasabah.

Laporan Tahunan 2022

- b) Melakukan prospek terhadap nasabah baik yang hamper lunas.
- c) Memprospek lagi nasabah lancar yang sudah tidak mempunyai pinjaman lagi di BPR Sinar Garuda.
- d) Mengaktifkan lagi telemarketing.

B. Manajemen Risiko

Bank berusaha memperhatikan dan melaksanakan konsep manajemen risiko yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

a) Risiko Likuiditas

Bank berusaha selalu menjaga tingkat likuiditasnya. Dengan cara melakukan pemantauan dan pencatatan atas tagihan serta kewajiban-kewajiban yang akan jatuh tempo untuk mencegah kemungkinan kesulitan likuiditas. Selain dari itu, Bank juga mengatur kondisi kas, baik yang ada di Kantor Pusat maupun yang ada di Kantor Cabang.

b) Risiko Kredit

Risiko Kredit adalah salah satu risiko bank yang sulit dihindarkan. Bank bisa mengatasinya dengan cara membuat aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan yang bisa digunakan untuk menjaga kondisi kredit bank supaya tetap berada pada kondisi yang baik, aman dan Sehat.

5. Laporan manajemen

Manajemen adalah unsur penggerak jalannya suatu usaha. Manajemen dalam bidang perbankan adalah salah satu unsur penting dalam penilaian Tingkat Kesehatan (TKS) Bank. Dalam rangka menciptakan pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)*, direksi menetapkan beberapa kebijakan sebagai berikut :

A. Struktur Organisasi

Struktur organisasi PT BPR Sinar Garuda Prima per 31 Desember 2022 sudah sesuai dengan kondisi team yang ada dan sudah disahkan oleh direksi. Dalam struktur organisasi PT BPR SINAR GARUDA PRIMA per 31 Desember 2022 terdapat pejabat eksekutif sebagai berikut :

No.	Jabatan	Nama
-----	---------	------

Laporan Tahunan 2022

1.	Manager Bisnis	Wahyu Ruli Nova Zendi S
2.	Manager Operasional Kantor Pusat	Dewi Utami Hartati
3.	Pimpinan Kantor Cabang Mertoyudan	Yunas Efendi,S.kom
4.	Audit Intern	Silfiana
5	Kepatuhan	Inneke Putri Rahmawati

*) Profil Terlampir

(Struktur organisasi terlampir)

Data karyawan per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut : Direksi membawahi 35 (tiga puluh lima) orang karyawan, dengan status 31 orang sebagai karyawan tetap dan 4 orang dengan perjanjian kerja. Jumlah karyawan tersebut terbagi untuk Kantor Pusat 23 orang dan Kantor Cabang 12 orang dengan tingkat pendidikan beragam.

Tingkat Pendidikan	Jumlah
Sarjana	17
Diploma 3	1
SLTA	16
SMP	1

B. Aktivitas Utama

Aktivitas utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk kredit. Dana masyarakat ini diterima bank dalam bentuk tabungan dan deposito. Produk penghimpunan dana yang dijalankan PT. BPR. Sinar Garuda Prima yaitu dalam bentuk Tabungan dan dalam bentuk Deposito. Jangka waktu Deposito ada yang 1, 3, 6 atau 12 bulan. Bunga Deposito yang diberikan bisa berubah-ubah sesuai dengan perkembangan bank, kebutuhan dana bank serta tetap mengacu pada perkembangan bunga LPS.

Disamping itu, pada saat bank mengalami kelebihan dana, bank akan menempatkan dananya dalam bentuk tabungan maupun deposito di bank lain.

Laporan Tahunan 2022

Aktivitas utama yang kedua adalah menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit. Jenis kredit yang diberikan ada 2 (dua) macam yaitu kredit dengan angsuran (flat) dan kredit musiman.

C. Perkembangan dan Target Pasar

Perkembangan bank di tahun 2022 telah menunjukkan perubahan, hal ini terlihat dari perkembangan asetnya. Aset bank di akhir tahun 2022 sebesar Rp.39.546.235ribu sedangkan aset di akhir tahun 2021 adalah sebesar Rp.38.555.604ribu sehingga mengalami pertumbuhan sebesar 2,57%. Pertumbuhan aset ini dipengaruhi oleh realisasi penghimpunan dana tabungan dengan produk TAHARA 4.

Berikut kami sampaikan penjelasan singkat tentang pos-pos yang mempengaruhi

Keterangan	2022	2021	pertumbuhan	%
Tabungan	6.943.281	6.040.685	902.596	14,94%
Deposito	16.879.324	17.307.250	(427.926)	-2,47%
Kredit yang Diberikan	22.736.776	21.754.939	981.837	4,51%

D. Jaringan Kerja Dan Mitra Usaha

Dalam menjalankan usahanya, bank juga menjalin kerjasama dengan beberapa pihak, baik dengan perorangan maupun instansi. Kerjasama ini baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dananya. Hal ini dirasa sangat bermanfaat, karena sangat mendukung usaha bank. Kegiatan operasional kami cukup efektif dan efisien baik dari segi biaya, waktu maupun hasil yang kami peroleh. Pihak-pihak yang telah bekerjasama dengan BPR dalam pengembangan usaha :

- 1) PT Mitranet Software Online sebagai penyedia Teknologi informasi
- 2) Notaris

Beberapa notaris telah melakukan perjanjian kerjasama dengan bank untuk memudahkan pengikatan perjanjian kredit diantaranya

- a) Evie Junani
- b) Ivan Lesmana

Laporan Tahunan 2022

c) Dwi Kimtoro

d) Ana Marwiati

3) Avalis

Dalam upaya perluasan usaha dan penjangkaran nasabah Bank melakukan kerjasama dengan perorangan sebagai avalis yang bertugas menjadi perantara antara nasabah dan bank. Dari perantara tersebut avalis mendapat imbalan *fee* dari bank sebagaimana telah diatur dalam perjanjian kerjasama. Terdapat 1 avalis aktif yaitu Yoto.

4) Krisenko

Krisenko menyediakan pelatihan / training untuk calon karyawan BPR.

E. Kepemilikan Kelompok Usaha

Perusahaan	Alamat	RY. Kristian Hardianto, SH		Dra. Nyauw Farida, Akt	
		2021	2022	2021	2022
PT BPR Gunung Rizki	Jl. Soekarno Hatta No. 132, Arteri Citarum, Semarang	45	45	15	15
PT BPR Arta Utama	Jl. Raya Sempu No. 35 A, Limpung, Batang	-	-	30	30
PT BPR Mentari Terang	Jl Gajah Mada No 32 C, Semanding, Tuban	-	-	60	60
PT BPR Dana Berkah Pusakatama	Jl Godean Km 6,5 Godean, Sleman, Yogyakarta	60	60	20	20
PT Tayu Dutapersada	Jl P Sudirman 105 Tayu	75	75	20	20

F. Sumber Daya Manusia (SDM)

Salah satu asset perusahaan adalah karyawan yang baik atau Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik adalah salah satu kunci keberhasilan suatu usaha Demikian juga dengan bank, pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) terus kami tingkatkan Pelatihan-pelatihan lain yang diadakan oleh Bank Indonesia Semarang juga sering kami ikuti Selain dari pihak ektern, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) oleh pihak intern PT BPR SINAR GARUDA PRIMA juga dilakukan dalam rangka untuk

Laporan Tahunan 2022

meningkatkan sikap mental, kinerja, loyalitas dan menyamakan visi dan misi karyawan Berdasarkan pengalaman dan pengamatan kami, pelatihan ini dirasa sangat berpengaruh terhadap peningkatan kinerja yang secara kuantitatif dapat terlihat dari perkembangan volume usaha

Kegiatan pelatihan maupun pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi karyawan yang telah kami lakukan selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

NO	WAKTU	PELATIHAN
1	Jan-22	Pelatihan Analisa Kredit
2	Mar-22	Forum Diskusi Audit
3	Mar-22	Studi Banding Bpr Pamanukan Bangunarta
4	Mar-22	Penyegaran Certif Direktur Utama
5	Jul-22	Training Of Trainer Inkubasi & Digitalisasi Umkm
6	Agu-22	Training Penilaian Agunan
7	Okt-22	Sertifikasi Human Resource
8	Okt-22	Studi Banding Bpr Lestari Bali
9	Nov-22	Musda Perbarindo 2022

G. Keterkaitan Pemegang Saham dan Pengurus Bank

Tabel Keterkaitan Komisaris

NAMA	JABATAN	Keterkaitan:		
		Dewan Komisaris	Direksi	Pemegang Saham
Erlina Sari Sutono	Komisaris Utama	Tidak	Tidak	Ya
Yosef Hening Krida Murdanto	Komisaris	Tidak	Tidak	Tidak

Tabel Keterkaitan Direksi

NAMA	JABATAN	Keterkaitan:		
		Dewan Komisaris	Direksi	Pemegang Saham
Anton Stefian Dwi Kristanto, SE	Direktur Utama	Tidak	Tidak	Ya
Satriya Sambodo, S.E, MM	Direktur dan Yang	Tidak	Tidak	Tidak

Membawahkan Fungsi Kepatuhan

H. Kebijakan Pemberian Gaji Dan Fasilitas Bagi Karyawan, Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris, Termasuk Bonus, Tantiem Dan Fasilitas Lainnya

Kebijakan pemberian gaji, THR, bonus tahunan serta fasilitas lainnya kepada karyawan, direksi dan komisaris didasarkan pada kinerja dan prestasinya selama satu tahun Secara berkala, gaji karyawan, direksi dan komisaris akan naik setiap satu tahun sekali THR diberikan satu kali dalam satu tahun dan diberikan menjelang Hari Raya Idul Fitri atau Hari Natal.

I. Teknologi Informasi

PT BPR Sinar Garuda Prima bekerja sama dengan PT MITRANET SOFTWARE ONLINE sebagai penyedia teknologi informasi sejak September 2012 dengan menggunakan aplikasi MBS Online Realtime. MBS Online Realtime adalah aplikasi core Banking realtime online untuk BPR Konvensional dengan system database terpusat, dimana database nasabah hanya berada di satu komputer yaitu computer server yang berada di Kantor Pusat Manajemen Sedangkan di KPO serta kantor cabang hanya diinstall interface MBS Online Realtime Operator dapat menggunakan Interface tersebut untuk melakukan kegiatan entri data maupun pencetakan berbagai laporan Jaringan komunikasi data yang digunakan oleh cabang untuk mengakses data ke komputer server di kantor pusat harus menggunakan fasilitas jaringan Virtual Private Network (VPN). Fasilitas ini disediakan oleh berbagai perusahaan layanan jasa komunikasi VPN, seperti Telkom, Indosat, Telkomsel, Bakrie Telecom, Lintas Artha dll atau dapat menggunakan jaringan internet public yang disetup menjadi private (VPN) Jaringan Virtual Private Network (VPN) akan melakukan enkripsi pengiriman data ke server tujuan atau sebaliknya Enkripsi data adalah syarat mutlak keamanan data dalam jaringan global VPN membuat komputer yang berada terpisah di berbagai gedung /kantor

Laporan Tahunan 2022

atau kota seolah-olah berada dalam jaringan private Komputer-komputer yang dapat mengakses jaringan VPN menuju server di Kantor Pusat harus terdaftar di komputer server kantor pusat MBS Online Realtime sebagai aplikasi core Banking realtime online BPR memiliki modul-modul yang menjalankan fungsi-fungsi dasar sistem komputerisasi perbankan Sistem operasional MBS Online Realtime secara garis besar terdiri dari beberapa modul sbb :

1) Modul Simpanan Tabungan

Yaitu modul yang mengelola produk simpanan tanpa batasan waktu, dimana setoran dan penarikan dilakukan berdasar syarat-syarat tertentu

2) Modul Simpanan Deposito Berjangka

Yaitu modul yang mengelola produk simpanan dengan batasan waktu berjangka, dimana setoran dan penarikan dilakukan berdasar syarat-syarat tertentu

3) Modul Pinjaman / Kredit

Yaitu modul yang mengelola produk pinjaman dana kepada pihak ketiga non-bank dengan batasan waktu dan syarat-syarat tertentu

4) Modul Antar Kantor

Yaitu modul yang mengelola kegiatan transaksi keuangan tunai maupun non-tunai yang dilakukan antar kantor cabang / KPO yang masih berada dalam satu BPR

5) Modul Antar Bank (Aktiva dan Pasiva)

Yaitu modul yang mengelola kegiatan transaksi keuangan tunai yang dilakukan cabang / KPO dengan BPR lain atau Bank Umum

6) Modul Inventaris

Yaitu modul yang mengelola data dan kegiatan transaksi inventaris

7) Modul Distribusi Kas

Yaitu modul yang mengelola kegiatan transaksi antara Kas Induk dengan Teller/Kantor Kas

8) Modul Akuntansi Umum

Yaitu modul yang mengelola kegiatan transaksi umum yang tidak bisa dikelola melalui modul 1 (satu) hingga modul 7 (tujuh)

Laporan Tahunan 2022

- 9) Modul Laporan Bulanan OJK dan SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan)
Modul laporan bulanan OJK dan SLIK merupakan modul yang hanya menjalankan fungsi export dan import yang disyaratkan sesuai Peraturan OJK
Secara default, modul Labul OJK dan SLIK adalah sebagai berikut :
- a) SLIK BPR
Yaitu modul yang mengelola komunikasi MBS Online dengan aplikasi SLIK BPR
Proses komunikasi menggunakan proses export-import dari MBS Online dan SLIK BPR
 - b) Labul BPR
Yaitu modul yang mengelola komunikasi MBS Online dengan aplikasi BPR Client
Proses komunikasi menggunakan proses export dari MBS Online dan import ke BPR Client
- 10) Modul SLIK(Sistem Layanan Informasi Keuangan)
Yaitu modul yang mengelola komunikasi MBS Online dengan aplikasi SLIK
Proses komunikasi menggunakan proses export-import dari MBS Online dan SLIK.
- J. Perubahan penting lain yang terjadi di BPR dan/ atau dikelompok usaha BPR yang mempengaruhi operasional BPR dalam tahun bersangkutan.

BAB II
LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN

1. Laporan Posisi Keuangan

Laporan Posisi Keuangan
PT.BPR Sinar Garuda Prima
Per 31 Desember 2022

ASET	Des 2022	Des 2021
Kas dalam Rupiah	288.713	178.031
Kas dalam Valuta Asing	0	0
Surat Berharga	0	0
Penempatan pada Bank Lain	16.066.436	15.593.231
-/- Penyisihan Penghapusan Aset Produktif	0	0
Jumlah	16.066.436	15.593.231
Kredit yang Diberikan		
a. Kepada BPR	0	0
b. Kepada Bank Umum	0	0
c. Kepada non bank – pihak terkait	1.151.184	233.905
d. Kepada non bank – pihak tidak terkait	21.233.711	21.521.034
-/- Penyisihan Penghapusan Aset Produktif	448.395	1.470.009
Jumlah	21.936.500	20.284.930
Agunan yang Diambil Alih	158.000	1.158.000
Aset Tetap dan Inventaris		
a. Tanah dan Bangunan	0	0
b. -/- Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai	0	0
c. Inventaris	1.360.494	1.106.535
d. -/- Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai	1.105.968	994.123
Aset Tidak Berwujud	0	0
-/- Akumulasi amortisasi dan penurunan nilai	0	0
Aset Lainnya	842.060	994.624
Total Aset	39.546.235	38.321.228

LIABILITAS	Des 2022	Des 2021
Liabilitas Segera	97.212	116.780
Simpanan		
a. Tabungan	6.943.281	6.040.685
b. Deposito	16.879.324	17.307.250
Simpanan dari Bank Lain	4.783	4.595
Pinjaman yang Diterima	0	0
Dana Setoran Modal-Kewajiban	0	0

Laporan Tahunan 2022

Liabilitas Lainnya	1.149.793	274.351
Total Liabilitas	25.074.393	23.743.661

EKUITAS	Des 2022	Des 2021
Modal Disetor		
a. Modal Dasar	15.000.000	15.000.000
b. Modal yang Belum Disetor -/-	7.000.000	7.000.000
Tambahan Modal Disetor		
a. Agio (Disagio)	0	0
b. Modal Sumbangan	0	0
c. Dana Setoran Modal-Ekuitas	0	0
d. Tambahan Modal Disetor Lainnya	0	0
Ekuitas Lain		
a. Keuntungan (Kerugian) dari Perubahan Nilai Aset Keuangan dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual	0	0
b. Keuntungan Revaluasi Aset Tetap	0	0
c. Lainnya	0	0
d. Pajak Penghasilan terkait dengan Ekuitas Lain	0	0
Cadangan		
a. Umum	1.600.000	1.600.000
b. Tujuan	0	0
Laba (Rugi)		
a. Tahun-tahun Lalu	4.178.499	4.556.929
b. Tahun Berjalan	693.343	621.571
Total Ekuitas	14.471.842	14.778.500

2. Laporan Laba Rugi

Laporan Laba Rugi PT BPR Sinar Garuda Prima Per 31 Desember 2022

POS	Des 2022	Des 2021
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
Pendapatan Bunga		
a. Bunga Kontraktual	4.601.082	4.707.550
b. Provisi Kredit	414.568	414.928
c. Biaya Transaksi -/-	6.401	6.767
Jumlah Pendapatan Bunga	5.009.248	5.115.711
Pendapatan Lainnya	664.197	1.414.356
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	5.673.445	6.530.067

Laporan Tahunan 2022

Beban Bunga		
a. Beban Bunga Kontraktual	1.115.357	1.262.329
b. Biaya Transaksi	0	0
Beban Kerugian Restrukturisasi Kredit	2.069	0
Beban Penyisihan Penghapusan Aset Produktif	133.021	1.302.019
Beban Pemasaran	71.276	22.273
Beban Penelitian dan Pengembangan	0	0
Beban Administrasi dan Umum	3.406.590	3.121.020
Beban Lainnya	43.098	48.474
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	4.771.411	5.756.115
LABA (RUGI) OPERASIONAL	902.034	773.952
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL		
Pendapatan Non Operasional	3.090	299.427
Beban Non Operasional		
Kerugian Penjualan/Kehilangan	62.754	0
Lainnya	39.097	579.449
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(98.761)	(280.022)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	803.273	493.930
TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN	109.930	73.292
JUMLAH LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	693.343	420.638
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi		
a. Keuntungan Revaluasi Aset Tetap	0	0
b. Lainnya	0	0
c. Pajak Penghasilan Terkait	0	0
Akan Direklasifikasikan ke Laba Rugi		
a. Keuntungan (Kerugian) dan Perubahan Nilai Aset Keuangan Dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual	0	0
b. Lainnya	0	0
c. Pajak Penghasilan Terkait	0	0
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK	0	0
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	693.343	420.638

3. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas
PT BPR Sinar Garuda Prima
Per 31 Desember 2022

KETERANGAN	2022	2021
ARUS KAS DARI KEGIATAN OPERASI		
LABA NETO	693.343	422.798
Penyesuaian Untuk Merekonsiliasi Laba Neto Menjadi Kas Bersih Diperoleh Dari Kegiatan Operasi :		0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap & Inventaris	111.845	87.349
Penyisihan Penghapusan Aset Produktif		- 0
Penempatan Pada Bank Lain	-	-8.293
Kredit Yang Diberikan	(1.021.614)	322.249
Amortisasi		- 0
Aset Tidak Berwujud		- 0
Provisi dan Administrasi	79.775	-77.701
Biaya Transaksi	6.246	-1.548
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Sebelum Perubahan Modal Kerja	(130.405)	744.854
Perubahan Aset dan Kewajiban Operasi:		- 0
Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima	61.878	1.147
Penempatan Pada Bank Lain	(473.205)	-2.588.164
Kredit Yang Diberikan	(774.939)	1.498.174
Pendapatan Yang Ditangguhkan Dalam Rangka Restrukturisasi	22.670	-32.316
Kerugian Restrukturisasi Kredit	36.292	
Agunan Yang Diambil Alih	1.000.000	-900.000
Aset lain-lain	325.060	-127.056
Kewajiban Segera	(19.568)	-239.769
Utang Bunga	(4.070)	-8.933
Utang Pajak	(84.394)	48.454
Simpanan		- 0
Tabungan	902.595	1.439.703
Deposito Berjangka	(427.926)	249.363
Simpanan Dari Bank Lain	187	-98.635
Kewajiban Imbalan Kerja	156.607	176706,32
Kewajiban Lain-lain	773.857	-83.703
Arus kas neto dari aktivitas operasi	1.495.045	-665.030

Laporan Tahunan 2022

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		- 0
Pembelian/Penjualan Aset Tetap dan Inventaris	(253.959)	-14.990
Arus Kas Neto Aktivitas Investasi	(253.959)	-14.990
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		- 0
Pembagian Dividen	(1.000.000)	
Koreksi Pendapatan Denda	-	-18.828
Arus Kas Neto dari Aktivitas Pendanaan	(1.000.000)	-18.828
KENAIKAN (PENURUNAN) ARUS KAS	110.682	46.006
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE	178.031	132.025
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE	288.712	178.031

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas PT BPR Sinar Garuda Prima Per 31 Desember 2022

Keterangan	Modal		Dana Setoran Modal	Saldo Laba			Jumlah
	Modal Disetor			Cadangan Tujuan	Cadangan Umum	Belum Ditentukan Tujuannya	
Saldo Per 31 Desember 2019	8.000.000.000	-	-	-	1.600.000.000	3.980.773.206	13.580.773.206
Pajak 2019	-	-	-	-	-	(373.000)	(373.000)
Koreksi Tantiem	-	-	-	-	-	360.000	360.000
Koreksi Laba Ditahan	-	-	-	-	-	1.200.000	1.200.000
Laba/Rugi Tahun 2020	-	-	-	-	-	593.796.459	593.796.459
Saldo Per 31 Desember 2020	8.000.000.000	-	-	-	1.600.000.000	4.575.756.665	14.175.756.665
Koreksi Pendapatan Denda	-	-	-	-	-	(18.827.951)	(18.827.951)
Laba/Rugi Tahun 2021	-	-	-	-	-	621.570.695	621.570.695
Saldo Per 31 Desember 2021	8.000.000.000	-	-	-	1.600.000.000	5.178.499.409	14.778.499.409
Pembagian Dividen	-	-	-	-	-	(1.000.000.000)	(1.000.000.000)
Laba/Rugi Tahun 2022	-	-	-	-	-	693.342.835	693.342.835
Saldo Per 31 Desember 2022	8.000.000.000	-	-	-	1.600.000.000	4.871.842.244	14.471.842.244

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

1. Iktisar Kebijakan Akuntansi

Laporan Keuangan disusun dan disajikan berdasarkan Pedoman Akuntansi BPR (PA BPR) dan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) serta praktek-praktek perbankan yang sesuai dengannya, serta pedoman pelaporan yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan.

1. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun berdasarkan asumsi dasar :

Laporan Tahunan 2022

- Dasar akrual (accrual basis), kecuali tagihan bunga atas aset produktif yang digolongkan sebagai non performing dicatat atas dasar kas basis.
- Biaya historis (historical cost), kecuali aset tetap tertentu yang dinilai kembali berdasarkan peraturan pemerintah, penyertaan saham tertentu yang dicatat berdasarkan metode ekuitas dan surat-surat berharga tertentu yang dinilai berdasarkan nilai pasar serta aset yang menurut standar akuntansi harus dilakukan penilaian uang.

Laporan arus kas disusun berdasarkan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang dikelompokkan ke dalam kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan dengan menggunakan metode tidak langsung.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah Rupiah.

2. Transaksi Dengan Pihak-Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa

Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 yang dimaksud dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

- 1) Perusahaan yang melalui satu atau perantara (intermediaries), mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama, dengan perusahaan pelapor (termasuk holding companies, subsidiaries, dan fellow subsidiaries);
- 2) Perusahaan asosiasi (associated companies);
- 3) Perorangan yang memiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung, suatu kepentingan hak suara di perusahaan pelapor yang berpengaruh secara signifikan, dan anggota keluarga dekat dari perorangan tersebut (anggota keluarga dekat adalah mereka yang dapat diharapkan mempengaruhi atau dipengaruhi perorangan tersebut dalam transaksinya dengan perusahaan pelapor);
- 4) Karyawan kunci, yaitu orang-orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, dan mengendalikan kegiatan perusahaan pelapor yang meliputi anggota dewan komisaris, direksi

Laporan Tahunan 2022

dan manajer dari perusahaan serta anggota keluarga dekat orang-orang tersebut; dan

- 5) Perusahaan di mana suatu kepentingan substansial dalam hak suara dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh setiap orang yang diuraikan dalam 3) atau 4), atau setiap orang tersebut mempunyai pengaruh signifikan atas perusahaan tersebut.

Seluruh transaksi dengan pihak berelasi baik yang dilakukan dengan atau tidak dengan kondisi dan persyaratan normal sebagaimana dilakukan dengan pihak ketiga diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

3. Kas

Kas adalah mata uang kertas dan logam rupiah yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Dalam pengertian kas termasuk kas besar, kas kecil, kas dalam mesin Anjungan Tunai Mandiri dan kas dalam perjalanan. Mata uang rupiah yang telah dicabut dan ditarik dari peredaran tidak berlaku sebagai alat pembayaran yang sah sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku. Mata uang dimaksud tidak termasuk dalam pengertian kas dan disajikan dalam aset lain-lain. Tidak termasuk dalam pengertian kas adalah emas batangan, uang logam yang diterbitkan untuk memperingati peristiwa nasional (commemorative coins/notes) dan mata uang emas.

4. Pendapatan bunga yang akan diterima

Pendapatan bunga yang akan diterima adalah pendapatan bunga dari kredit (pinjaman yang diberikan) dengan kualitas lancar (performing) yang telah diakui sebagai pendapatan tetapi belum diterima pembayarannya. Termasuk dalam pengertian ini adalah pengakuan pendapatan bunga dari penempatan pada bank lain.

Pendapatan bunga diakui dengan menggunakan metode akrual. Pendapatan bunga atas aset produktif yang digolongkan sebagai nonperforming (kurang lancar, diragukan, dan macet) dicatat sebagai tagihan kontijensi dan diakui sebagai pendapatan pada saat diterima secara tunai (cash basis).

5. Penempatan pada bank lain

Penempatan Pada Bank Lain terdiri dari: giro pada bank umum, tabungan pada bank lain, deposito pada bank lain dan sertifikat deposito pada bank umum.

1) Giro pada bank umum

Merupakan simpanan BPR pada bank umum yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, saranaperintah pembayaran lain atau dengan cara pemindahbukuan.

2) Tabungan pada bank lain

Merupakan simpanan BPR pada bank umum dan BPR lain yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lain yang dapat dipersamakan dengan itu.

3) Deposito pada bank lain

Merupakan simpanan BPR pada bank umum dan BPR lain yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara BPR dan bank yang bersangkutan. Deposito yang dimaksud adalah deposito yang berjangka waktu. sewaktu-waktu dengan pemberitahuan sebelumnya.

6. Kredit yang diberikan

Kredit yang diberikan (kredit) adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara BPR dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam (debitur) untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kredit disajikan dineraca sebesar pokok kredit/bakidebet dikurangi provisi serta ditambah biaya transaksi yang belum diamortisasi. Pokok kredit adalah saldo kredit yang telah digunakan debitur dan belum dilunasi oleh debitur (biasa disebut sebagai baki debit). Biaya transaksi adalah semua biaya tambahan yang terkait secara langsung dengan pemberian kredit yang ditanggung oleh BPR, misalnya marketing fee. Dalam hal biaya transaksi dibebankan kepada nasabah maka biaya tersebut tidak termasuk dalam biaya perolehan pemberian kredit. Biaya tambahan adalah biaya yang tidak akan

Laporan Tahunan 2022

dikeluarkan apabila tidak terdapat penyaluran kredit. Provisi kredit adalah biaya yang harus dibayar debitur pada saat kredit disetujui dan biasanya dinyatakan dalam persentase.

7. Penyisihan penghapusan aset produktif

1) Pinjaman yang Diberikan

Penyisihan Kerugian Kredit dibentuk untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul sehubungan dengan penanaman dana ke dalam kredit. Penghapusbukuan Kredit (HapusBuku) adalah tindakan administratif BPR untukmenghapusbuku kredit mace tdari neraca sebesar kewajiban debitur tanpa menghapus hak tagih BPR kepada debitur.

Penghapusan Hak Tagih Kredit (Hapus Tagih) adalah tindakan BPR menghapus kewajiban debitur yang tidak dapat diselesaikan

2) Penempatan pada bank lain

Penyisihan yang dibentuk untuk menutup kemungkinan kerugian atas tabungan atau deposito tersebut disajikan sebagai pengurang (offsettingaccount)dari tabungan atau deposito tersebut (jika ada penurunan nilai atau kemungkinan kerugian).

8. Agunan Yang Diambil Alih

Agunan yang diambil alih adalah aset yang diperoleh BPR, baik melalui pelelangan maupun diluar pelelanga nberdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada BPR.

9. Aset Tetap dan Inventaris

Aset tetap dan inventaris adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam penyediaan jasa atau untuk tujuan administratif, dan diharapkan akan digunakan lebih dari satu periode.

Aset tetap dinyatakan berdasarkan biaya perolehan (cost) dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Penyusutan dihitung berdasarkan metode garis lurus (straight-line method) sesuai dengan taksiran masa manfaat ekonomisnya.

Laporan Tahunan 2022

Pemeliharaan dan perbaikan rutin dibebankan sebagai biaya pada laporan laba rugi pada saat terjadinya. Sedangkan pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat keekonomian di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas ditambahkan pada jumlah tercatat aset yang bersangkutan (kapitalisasi).

Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau dijual, dikeluarkan dari kelompok aset tetap yang bersangkutan dan laba/rugi yang terjadi dibukukan sebagai pendapatan atau biaya pada periode bersangkutan.

10. Aset lain-lain

Aset Lain-lain adalah pos-pos aset yang tidak dapat secara layak digolongkan dalam kelompok pos aset yang ada dan tidak secara material untuk disajikan tersendiri.

Aset lain-lain disajikan secara gabungan, kecuali nilainya material maka wajib disajikan tersendiri dalam neraca.

11. Kewajiban segera

Kewajiban segera adalah kewajiban yang telah jatuh tempo dan atau yang segera dapat ditagih oleh pemiliknya dan harus segera dibayar.

12. Utang Bunga

Utang bunga adalah utang bunga yang timbul dari transaksi lainnya, seperti sewa pembiayaan, pinjaman yang diterima, pinjaman subordinasi, modal pinjaman dll.

Utang Bunga diakui sebesar jumlah bunga kontraktual, baik untuk akrual bunga maupun yang telah jatuh tempo.

13. Utang pajak

Utang pajak merupakan selisih kurang atas kewajiban pajak penghasilan BPR setelah memperhitungkan angsuran pajak atau pajak dibayar dimuka. Utang Pajak disajikan sebesar jumlah yang harus diselesaikan

14. Simpanan

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat (di luar bank umum atau BPR lain) kepada BPR berdasarkan perjanjian penyimpanan dana. Dalam

Laporan Tahunan 2022

kegiatan pengumpulan dana masyarakat, BPR menjual produk simpanannya kepada nasabah berupa tabungan dan deposito atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.

15. Kewajiban Lain-Lain

Kewajiban Lain-lain merupakan pos yang dimaksudkan untuk menampung kewajiban BPR yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu pos kewajiban yang ada dan tidak cukup material untuk disajikan dalam pos tersendiri. Kewajiban lain-lain diakui sebesar jumlah yang harus diselesaikan.

16. Modal

1) Modal Disetor

- Modal disetor diakui pada saat penerimaan setoran modal baik berupa dana kas maupun aset non-kas.
- Modal disetor dicatat berdasarkan:
 - a) Jumlah uang yang diterima.
 - b) Setoran saham dalam bentuk uang, sesuai transaksi nyata.
 - c) Besarnya utang yang dikonversi menjadi modal.
 - d) Setoran saham dalam dividen saham dilakukan dengan harga wajar saham, yaitu nilai wajar yang disepakati RUPS untuk saham.
 - e) Nilai wajar aset non-kas yang diterima.

Setoran saham dalam bentuk aset non-kas, menggunakan nilai wajar aset non-kas yang diserahkan, yaitu nilai appraisal tanggal transaksi yang disetujui Dewan Komisaris, atau nilai kesepakatan Dewan Komisaris dan penyeter aset non-kas.
- Pengeluaran saham dicatat sebesar nilai nominal yang bersangkutan. Apabila jumlah yang diterima dari pengeluaran saham tersebut lebih besar daripada nilai nominalnya, maka selisihnya dibukukan pada akun Agio Saham.

2) Tambahan Modal Disetor (Agio Saham)

- Tambahan modal disetor diakui pada saat penerimaan setoran modal dari pihak ketiga baik berupa dana kas maupun aset non- kas.
- Penambahan pos Tambahan Modal Disetor diakui pada saat:

Laporan Tahunan 2022

- a) dilakukan penambahan setoran kas oleh pemilik sebesar kas yang diterima;
- b) dilakukan penambahan setoran aset non-kas sebesar nilai wajar aset non-kas yang diterima.

17. Saldo laba

Saldo laba (laba ditahan) adalah akumulasi hasil usaha periodik setelah memperhitungkan pembagian dividen, koreksi laba rugi periode lalu, dan reklasifikasi surplus revaluasi aset tetap.

Saldo laba dikelompokkan menjadi:

- 1) Cadangan tujuan, yaitu cadangan yang dibentuk dari laba neto setelah pajak yang tujuan penggunaannya telah ditetapkan.
- 2) Cadangan umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari laba neto setelah pajak yang dimaksudkan untuk memperkuat modal, dan
- 3) Saldo laba yang belum ditentukan tujuannya, terdiri dari:
 - Laba rugi periode lalu yang belum ditetapkan penggunaannya; dan
 - laba rugi periode berjalan

18. Dana Setoran Modal – Ekuitas (DSM – Ekuitas)

Dana Setoran Modal – Ekuitas (DSM – Ekuitas) adalah dana yang telah disetor secara riil ke rekening BPR di bank umum dan diblokir untuk tujuan penambahan modal dan dinyatakan telah memenuhi ketentuan permodalan yang berlaku, namun belum didukung dengan kelengkapan persyaratan untuk dapat digolongkan sebagai modal disetor seperti Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota maupun pengesahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang. Dana setoran modal yang dinyatakan memenuhi ketentuan permodalan yang berlaku direklasifikasi dari kewajiban (DSM– Kewajiban) ke ekuitas (DSM – Ekuitas) sebesar jumlah dana yang memenuhi ketentuan permodalan yang berlaku.

Laporan Tahunan 2022

19. Laba/Rugi yang Belum Direalisasi

Laba/Rugi yang Belum Direalisasi adalah selisih nilai wajar surat berharga dalam kategori tersedia untuk dijual pada tanggal neraca dengan nilai tercatat

20. Surplus Revaluasi Aset Tetap

Surplus Revaluasi Aset Tetap adalah selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dan inventaris sebelum dilakukan revaluasi.

21. Pendapatan Operasional

Pendapatan Operasional adalah semua pendapatan yang berasal dari kegiatan utama BPR. Pendapatan operasional terdiri dari pendapatan bunga dan pendapatan operasional lainnya.

Pendapatan Bunga adalah pendapatan yang diperoleh dari penanaman dana BPR pada aset produktif, dimana pendapatan bunga termasuk provisi dikurangi biaya-biaya yang terkait langsung dalam penyaluran kredit yang ditanggung oleh BPR (biaya transaksi).

Provisi adalah biaya yang harus dibayar debitur pada saat kredit disetujui dan biasanya dinyatakan dalam persentase.

Biaya Transaksi adalah semua biaya tambahan yang terkait secara langsung dengan pemberian kredit yang ditanggung oleh BPR, misalnya marketing fee. Dalam hal biaya transaksi dibebankan kepada nasabah maka biaya tersebut tidak termasuk dalam biaya perolehan pemberian kredit.

Pendapatan Operasional Lainnya adalah berbagai pendapatan yang timbul dari aktivitas yang mendukung kegiatan operasional BPR.

22. Beban Operasional

Beban Operasional adalah semua beban yang dikeluarkan atas kegiatan yang lazim sebagai usaha BPR. Beban diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal.

23. Pendapatan Non Operasional

Pendapatan Non-operasional adalah semua pendapatan yang berasal dari kegiatan yang bukan merupakan kegiatan utama BPR.

Laporan Tahunan 2022

24. Beban Non Operasional

Beban non operasional adalah semua bebanyang berasal dari kegiatan yang bukan merupakan kegiatan utama BPR.

25. Beban Pajak penghasilan

Beban Pajak Penghasilan adalah jumlah agregat beban pajak kini yang diperhitungkan dalam penghitungan laba atau rugi pada satu periode.

BAB III
OPINI AKUNTAN PUBLIK

Berdasarkan hasil laporan auditor independen KAP Drs Henry & Sugeng terhadap laporan keuangan PT BPR Sinar Garuda Prima posisi tanggal 31 Desember 2022 beropini bahwa laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal material, posisi keuangan perusahaan PT BPR Sinar Garuda Prima tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

**BAB IV
PENGUNGKAPAN LAPORAN TAHUNAN**

1. Penjelasan Atas Pos - Pos Neraca

1.a. Kas

Kas adalah jumlah uang tunai yang ada di kas bank yang berupa uang kertas dan uang logam yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Kas per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 288.713ribu.

1.b. Penempatan Pada Bank Lain

Penempatan Pada Bank Lain merupakan dana bank yang ditempatkan pada bank lain, yaitu berupa Giro, Tabungan dan Deposito.

**Rincian penempatan Pada Bank Lain
Per 31 Desember 2022**

NO	NAMA BANK	JENIS PENEMPATAN	KUALITAS	SALDO	PPAP
1	PT BANK NISP, Tbk	GIRO	Lancar	898.872.112	0
2	Bank Jateng	TABUNGAN	Lancar	83.368.756	0
3	Bank Danamon	TABUNGAN	Lancar	538.940.523	0
4	BPR Dana Berkah	TABUNGAN	Lancar	72.703.750	0
5	Bank Mandiri	TABUNGAN	Lancar	80.289.147	0
6	BPR PAMANUKAN BANGUNARTA	TABUNGAN	Lancar	20.980	0
7	BCA	TABUNGAN	Lancar	92.551.076	0
8	PT BPR Niji	DEPOSITO UMUM	Lancar	287.698.829	0
9	PT BPR INTAN SURYA	DEPOSITO UMUM	Lancar	668.417.151	0
10	PT BPR Niji	DEPOSITO UMUM	Lancar	391.268.734	0
11	PT BPR SINAR MITRA SEJAHTERA	DEPOSITO UMUM	Lancar	1.000.000.000	0
12	PT BPR AGUNG SEJAHTERA	DEPOSITO UMUM	Lancar	1.000.000.000	0
13	PT BPR DANA BERKAH PUSAKATAMA	DEPOSITO UMUM	Lancar	1.181.787.785	0
14	PT BPR SINAR MITRA SEJAHTERA	DEPOSITO UMUM	Lancar	1.000.000.000	0
15	PT BPR LESTARI JATENG	DEPOSITO UMUM	Lancar	1.108.209.481	0
16	PT BPR ARTA UTAMA	DEPOSITO UMUM	Lancar	1.000.000.000	0
17	PT BPR LESTARI BALI	DEPOSITO UMUM	Lancar	532.475.496	0
18	PT BPR LESTARI BALI	DEPOSITO UMUM	Lancar	532.475.496	0
19	BPR PAMANUKAN BANGUNARTA	DEPOSITO UMUM	Lancar	1.067.357.000	0
20	PT BPR AGUNG SEJAHTERA	DEPOSITO UMUM	Lancar	1.000.000.000	0
21	PT BPR ARAYA ARTA	DEPOSITO UMUM	Lancar	500.000.000	0
22	PT BPR ARAYA ARTA	DEPOSITO UMUM	Lancar	500.000.000	0
23	BPR PAMANUKAN BANGUNARTA	DEPOSITO UMUM	Lancar	500.000.000	0
24	PERUMDA BPR BANK JOGJA	DEPOSITO UMUM	Lancar	1.000.000.000	0

Laporan Tahunan 2022

25	PERUMDA BPR BANK JOGJA	DEPOSITO UMUM	Lancar	1.000.000.000	0
26	Bank Jateng	DEPOSITO KHUSUS	Lancar	30.000.000	0

1.c. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif

Merupakan penyisihan dan penghapusan aktiva produktif atas penempatan pada bank lain. Besarnya Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif per 31 Desember 2022 adalah Rp 0 ribu

1.d. Kredit Yang Diberikan

Jumlah yang ada dalam kredit yang diberikan adalah baki debet pemberian kredit oleh BPR yang diberikan kepada pihak ketiga bukan bank, kredit yang dimaksud adalah baik yang berupa sistem angsuran maupun sistem bunga musiman. Kredit yang sudah disalurkan PT. BPR. Sinar Garuda Prima per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

a) Berdasarkan Kolektibilitas Kredit

Kolektabilitas	Baki Debet
Lancar (L)	16.893.654
Dalam Pengawasan (DP)	542.757
Kurang Lancar (KL)	2.679.177
Diragukan (D)	0
Macet (M)	2.621.188
Total	22.736.777

b) Berdasarkan Jenis Kredit

No.	Sistem Bunga	Baki Debet
1	Flat Tetap	2.113.321
2	FLATE GP DISTRIBUSI	500.000
3	Efektif Harian Non-RC	5.836.250
4	Efektif Bulanan	4.496.087
5	Anuitas	1.665.044
6	Flat Menurun	8.126.074
Total		22.736.777

c) Berdasarkan Keterkaitan

No	Keterkaitan	Baki debet
1.	Pihak Terkait	1.157.649

Laporan Tahunan 2022

2.	Pihak Tidak Terkait	21.579.128
----	---------------------	------------

1.e. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)

PPAP adalah penyisihan yang dibentuk untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul akibat dari tidak diterimanya kembali sebagian atau seluruh kredit yang diberikan maupun dana yang ditempatkan di bank lain. PPAP per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 448.395 ribu.

1.f. Agunan yang diambil alih

Jumlah Agunan yang diambil alih per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.158.000 ribu.

No	Tanggal	Uraian	Agunan	Nilai
1	06/12/2013	Saebani	Wonokerto, Tegalrejo	108.000
2	13/03/2021	Supratiwi Handayani	Tempuran Tanggulrejo Magelang	50.000
Total				1.158.000

1.g. Aset Tetap Dan Inventaris

Harga perolehan Aset Tetap Dan Inventaris per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 1.360.494ribu.

1.h. Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai

Jumlah Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 1.105.968 ribu.

1.i. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain adalah jumlah asset-aset lain yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan kedalam salah satu dari pos-pos aktiva tersebut. Aset Lain-lain bank pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 842.061 ribu.

1.j. Liabilitas Segera

Liabilitas Segera adalah semua kewajiban BPR yang segera dapat ditagih oleh pemiliknya dan harus segera dibayar. Kewajiban yang segera dibayar oleh BPR per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 97.212 ribu.

1.k. Tabungan

Laporan Tahunan 2022

Yang dimaksud tabungan dalam pos ini adalah simpanan dari pihak ketiga bukan bank yang berhasil dihimpun oleh bank dengan saldo per tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp. 6.943.281ribu.

1.l. Deposito

Deposito adalah simpanan pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai perjanjian antara BPR dengan deposan. Deposito yang sudah jatuh tempo tetap dimasukkan ke dalam pos ini. Saldo deposito per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 16.879.324 ribu.

1.m. Simpanan dari bank lain

Jumlah Simpanan dari bank lain per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.4.783ribu.

1.n. Liabilitas Lainnya

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah jumlah kewajiban bank lainnya yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam salah satu dari pos kewajiban tersebut. Kewajiban Lain-lain per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 1.149.793ribu yang berupa Cadangan Pendidikan, Pendapatan Diterima Dimuka, dan Kewajiban lainnya.

1.o. Modal Dasar

Yang dimaksudkan Modal Dasar adalah jumlah modal yang tercantum dalam anggaran dasar BPR. Jumlah Modal Dasar BPR. Sinar Garuda per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 15.000.000 ribu.

1.p. Modal yang belum disetor

Yang dimaksudkan Modal yang belum disetor adalah jumlah modal yang belum disetor untuk memenuhi Modal Dasar. Jumlah Modal yang belum disetor PT.BPR Sinar Garuda per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 7.000.000ribu.

1.q. Saldo Laba

a) Cadangan Umum

Yang dimaksud Cadangan Umum adalah cadangan yang dibentuk dari Laba Bersih (setelah dikurangi pajak) yang dimaksudkan untuk memperkuat modal. Besarnya Cadangan Umum per 31 Desember 2022 adalah Rp. 1.600.000 ribu.

Laporan Tahunan 2022

b) Laba Tahun Lalu

Adalah laba pada periode tahun-tahun yang lalu yang oleh Rapat Umum Pemegang Saham belum diputuskan penggunaannya. Jumlah dalam sub pos ini per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 4.178.499 ribu.

c) Laba Tahun berjalan

Jumlah rugi tahun berjalan adalah sebesar Rp. 693.343ribu.

2. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Laba Rugi

2.a. Pendapatan Bunga Kontraktual

Pendapatan Bunga ini terdiri dari bunga penempatan pada bank lain dan bunga dari pihak ketiga bukan bank sebagai berikut:

No	Keterangan	Tahun 2022	Tahun 2021
1	Pendapatan Bunga Dari Bank Lain	687.078	670.181
2	Pendapatan Bunga Dari Pihak Ketiga Bukan Bank	3.914.004	4.006.647
3	Biaya transaksi	-6.401	-6.767
Jumlah		4.594.681	4.865.815

2.b. Pendapatan Provisi

adalah pendapatan yang diterima oleh BPR dari kredit yang diberikan. Besarnya pendapatan provisi per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 414.568 ribu.

2.c. Biaya Transaksi

Semua biaya tambahan yang terkait secara langsung dengan pemberian kredit yang ditanggung oleh BPR. Biaya transaksi dalam rangka pemberian kredit yang ditanggung oleh BPR diamortisasi selama masa kredit secara garis lurus. Amortisasi tersebut diakui sebagai pengurang pendapatan bunga. Jumlah biaya transaksi sebesar Rp. 6.401ribu.

2.d. Pendapatan Operasional Lainnya

Adalah pendapatan yang tidak dapat digolongkan pada pos diatas. Pendapatan operasional lainnya per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 664.196 ribu.

2.e. Beban Bunga Kontraktual

Laporan Tahunan 2022

No	Keterangan	Tahun	Tahun
		2022	2021
1	Beban Bunga Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	1.067.996	1.217.617
2	Simpanan Dari Bank Lain	187	1.365
3	Premi LPS	47.174	43.346
Jumlah		1.115.357	1.574.923

2.f. Beban Penyisihan Kerugian

Beban Penyisihan Kerugian adalah beban penyisihan dan penghapusan aktiva produktif yang terdiri dari :

- a) PPAP Penempatan Pada Bank Lain sebesar 0
- b) PPAP Kredit sebesar Rp. 135.090ribu

2.g. Beban Pemasaran

Besarnya beban pemasaran per 31 Desember 2022 adalah Rp. 71.276ribu.

2.h. Beban Administrasi dan Umum

No	Keterangan	Tahun	Tahun
		2022	2021
1	Beban Tenaga Kerja	2.199.219	2.160.961
2	Beban Pendidikan	37.694	30.484
3	Beban Sewa	294.106	282.033
4	Beban Penyusutan/Penghapusan Aset Tetap	116.345	87.349
5	Beban premi asuransi	280.546	256.363
6	Beban Pemeliharaan dan Perbaikan	141.036	50.026
7	Beban Barang dan Jasa	328.279	245.813
8	Beban Pajak (Non PPh)	9.364	7.992
Jumlah		3.406.589	3.121.020

2.i. Biaya Operasional Lainnya

Biaya Operasional Lainnya adalah biaya operasional selain yang sudah diuraikan diatas. Biaya ini terdiri dari biaya makan dan minum, biaya Jasa Teknik, biaya provisi, biaya administrasi bank, biaya perijinan & lisensi, biaya ongkos angkut,

Laporan Tahunan 2022

dan biaya operasional lain-lain. Besarnya Biaya Operasional Lainnya per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 43.097ribu.

2.j. Pendapatan Non Operasional

Besarnya pendapatan non oerasional per 31 Desember 2022 Rp. 3.090ribu.

2.k. Beban Non Operasional

Beban Non Operasional adalah beban yang dikeluarkan oleh bank yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan operasional bank. Beban non operasional ini terdiri dari beban denda, beban sumbangan dan beban lain-lain. Beban Non Operasional selama tahun 2022 adalah sebesar Rp. 101.852 ribu.

2.l. Laba Bersih Sebelum Pajak

Laba bersih sebelum pajak adalah saldo laba bersih yang diperoleh bank selama satu tahun buku (tahun 2022) sebelum dikurangi taksiran pajak. Besarnya laba bersih sebelum pajak per 31 Desember 2022 adalah Rp. 803.273ribu.

3. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Arus Kas

3.a Arus Kas dari Kegiatan Operasi

Arus kas dari kegiatan operasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 1.495.045 ribu.

3.b Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp.-253.959 ribu

3.c Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp.1.000.000ribu

4. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

4.aModal Disetor

Modal disetor per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 8.000.000 ribu.

4.b Cadangan Umum

Cadangan umun per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 1.600.000 ribu.

4.c Belum Ditentukan Tujuannya

Belum ditentukan tujuannya per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 4.871.842 ribu.

5. Penjelasan Atas Pos-Pos Komitmen Dan Kontijensi

5.a Komitmen

Laporan Tahunan 2022

Pos komitmen merupakan fasilitas pinjaman yang diterima dan belum ditarik oleh nasabah dan fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik.

5.b Kontijensi

Pos kontijensi merupakan pendapatan bunga dari pinjaman yang tertunggak belum diakui sebagai pendapatan tahun berjalan dan aset produktif yang dihapus buku. Pos kontijensi per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 4.509.462ribu.

BAB V
PENGUNGKAPAN (DISCLOSURE)

1. Transaksi Hubungan Istimewa

Transaksi hubungan istimewa selama 2022 dilakukan kepada PT BPR DANA BERKAH PUSAKATAMA yang dilakukan pada penghimpunan dan penyaluran dana. Penghimpunan dana dilakukan melalui Antar Bank Aktiva dan Antar Bank Pasiva. Penyaluran dana dilakukan melalui fasilitas kredit sindikasi.

Penempatan pada bank lain:

No.	Nama Bank	jenis	Tgl. Valuta	Jth Tempo	Bunga	Saldo
1	BPR Dana Berkah	Tabungan	14/07/2014		3,00	72.704
2	BPR PAMANUKAN BANGUNARTA	Tabungan	28/02/2022		1,75	20
3	PT BPR DANA BERKAH PUSAKATAMA	Deposito	30/12/2022	30/06/2023	6,25	1.181.788
4	PT BPR ARTA UTAMA	Deposito	04/12/2022	04/06/2023	6,25	1.000.000
5	BPR PAMANUKAN BANGUNARTA	Deposito	30/01/2023	28/02/2023	6,25	1.067.357
6	BPR PAMANUKAN BANGUNARTA	Deposito	20/02/2023	20/03/2023	6,25	500.000
Total						3.821.870

Penyedia dana bank lain:

No.	Jenis	Nama Bank	Tgl. Valuta	Tgl Jth Tempo	Suku Bunga	Saldo
1	Tabungan	PT. BPR Dana Berkah Pusakatama	16/01/2013		4	4.783

2. Perubahan akuntansi dan koreksi kesalahan

Selama tahun 2022, tidak terdapat perubahan akuntansi dan koreksi kesalahan yang dilakukan oleh bank.

3. Pengungkapan komitmen dan kontijensi

POS	Des 2022	Des 2021
TAGIHAN KOMITMEN	0	0
a. Fasilitas pinjaman yang diterima yang belum ditarik	0	0
b. Tagihan Komitmen lainnya	0	0
KEWAJIBAN KOMITMEN	0	0
a. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	0	0

Laporan Tahunan 2022

b. Penerusan kredit	0	0
c. Kewajiban Komitmen Lainnya	0	0
TAGIHAN KONTINJENSI	4.509.462	7.501.605
a. Pendapatan bunga dalam Penyelesaian	352.733	1.153.051
b. Aset produktif yang dihapus buku	4.156.729	6.348.554
c. Agunan dalam proses penyelesaian kredit	0	0
d. Tagihan Kontinjensi Lainnya	0	0
KEWAJIBAN KONTINJENSI	0	0
REKENING ADMINISTRATIF LAINNYA	0	0

4. Perkembangan Standar akuntansi dan Pedoman Akuntansi BPR

Tidak terdapat Perkembangan Standar akuntansi dan Pedoman Akuntansi BPR selama 2022.

5. Peristiwa setelah tanggal neraca

Tidak terdapat peristiwa penting, informasi atau fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan.

BAB VI

SURAT KOMENTAR (*MANAGEMENT LETTER*)

1. TATA KELOLA (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

a. Asuransi Penyimpanan Uang

Kondisi:

Uang merupakan produk khusus terutama bagi berbagai lembaga keuangan. Asuransi memberikan perlindungan untuk uang tunai atau alat tukar lain yang senilai dengan uang terhadap berbagai risiko, selama penyimpanan saat di counter teller maupun dalam brankas. Bank Perkreditan Rakyat belum memiliki Asuransi yang memberikan jaminan atas terjadinya resiko kehilangan/pencurian selama dalam brankas atau cashier box.

Rekomendasi:

Bank Perkreditan Rakyat memiliki asuransi penyimpanan uang agar memberikan jaminan atas terjadinya resiko kehilangan uang yang disimpan dalam brankas dan/atau di box kasir yang timbul akibat kehilangan, pencurian, perampokan, pembongkaran, penggelapan dan tindakan sejenis lainnya yang dilakukan oleh bukan bertanggung atau orang yang dikuasakan mengelola uang tersebut.

Tanggapan Manajemen:

BPR telah melakukan evaluasi terhadap resiko kehilangan uang yang disimpan dalam brankas antara menerima resiko atau mengalihkan resiko dengan memiliki asuransi penyimpanan uang dan sampai saat ini BPR masih akan menerima resiko sehingga belum akan memiliki asuransi tersebut.

b. Asuransi Pengiriman Uang (*Cash In Transit*)

Kondisi :

Laporan Tahunan 2022

Asuransi Cash In Transit memberikan jaminan atau proteksi atas kehilangan Uang yang terjadi dalam masa Transit yang dilakukan, kehilangan mana harus dilakukan oleh pihak lain dengan disertai adanya unsur kekerasan. Memberikan jaminan kerugian kepada tertanggung atas pengiriman uang yang timbul akibat kehilangan, pencurian, perampokan, pembongkaran, penggelapan, atau tindakan sejenis yang dilakukan oleh bukan tertanggung atau orang yang dikuasakan untuk mengelola uang tersebut. Penyetoran uang oleh Bank Perkreditan Rakyat kepada bank lain dilakukan dengan penyetoran langsung (setor tunai) kepada bank yang bersangkutan. Bank Perkreditan Rakyat belum memiliki Asuransi Pengiriman Uang yang memberikan jaminan atas uang yang terjadi dalam masa transit yang dilakukan.

Rekomendasi:

Bank Perkreditan Rakyat sebaiknya memiliki asuransi pengiriman uang untuk memberikan jaminan kerugian yang terjadi dalam masa transit.

Tanggapan Manajemen:

BPR telah melakukan evaluasi terhadap resiko pengiriman uang antara menerima resiko atau mengalihkan resiko dengan memiliki asuransi pengiriman uang dan sampai saat ini BPR masih akan menerima resiko sehingga belum akan memiliki asuransi tersebut.

2. AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH (AYDA)

a. Penyelesaian AYDA

Kondisi:

Berdasarkan daftar Agunan Yang Diambil Alih terdapat Agunan Yang Diambil Alih yang belum terselesaikan melebihi jangka waktu 1 tahun.

No.	Nama Debitur	Tanggal AYDA	Nilai
1.	Saebani	06/12/2013	108.000.000

Laporan Tahunan 2022

2.	Supratiwi Handayani	13/03/2018	50.000.000
		Jumlah	158.000.000

Dasar Aturan:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/POJK.03/2018 Tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan.
- b. Kebijakan Perkreditan BPR tanggal 1 Oktober 2019 PT BPR Sinar Garuda.
- c. Pedoman Standard Operation Procedure Penanganan Kredit Bermasalah PT BPR Sinar Garuda.
- d. Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat

Rekomendasi:

Sesuai POJK No.33/POJK.03/2018, BPR wajib melakukan upaya penyelesaian terhadap AYDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2.b) dalam waktu 3 sampai 5 tahun sejak pengambilalihan agunan. Jika BPR tidak dapat menyelesaikan AYDA maka nilai AYDA yang tercatat pada neraca wajib diperhitungkan sebagai faktor pengurang modal inti BPR dalam perhitungan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) sebesar 75% dari nilai AYDA. ayat (2.c) untuk AYDA yang telah dimiliki lebih dari 5 tahun jika BPR tidak dapat menyelesaikan AYDA maka nilai AYDA yang tercatat pada neraca wajib diperhitungkan sebagai faktor pengurang modal inti BPR dalam perhitungan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) sebesar 100% dari nilai AYDA.

Tanggapan Manajemen :

1. Upaya penyelesaian terhadap AYDA a.n Saebani telah dilakukan dan telah menemukan pembeli namun pembeli ingin bertemu langsung

Laporan Tahunan 2022

dengan debitur, namun debitur meminta waktu sampai dengan Maret 2023 untuk dapat membeli kembali aset debitur.

2. AYDA a.n Supratiwi Handayani sudah ada pembeli dan telah membayarkan uang tanda jadi dan menunggu proses selanjutnya dari notaris.

3. SIMPANAN

a. Penjaminan LPS

Kondisi:

Berdasarkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 Tentang Program Penjaminan Simpanan Pasal 29 Saldo yang dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 untuk setiap nasabah pada satu Bank adalah paling tinggi Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Terdapat nasabah dengan nominal saldo simpanan di atas nilai penjaminan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) sebesar Rp2 milyar, atas hal ini BPR belum melengkapi deponan/penabung tersebut dengan surat pernyataan yang telah ditanda tangani oleh nasabah bahwa apabila saldo lebih dari Rp2 milyar bersedia untuk tidak dijamin oleh LPS.

No	Nama	Deposito	Tabungan	Jumlah
1	Seminari Menengah Santo Petrus Canisius	Rp2.000.000.000	Rp518.026.007,-	Rp2.518.026.007,-

Dasar Aturan:

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 Tentang Program Penjaminan Simpanan.

Rekomendasi:

Sebaiknya BPR membuat surat pernyataan atas persetujuan nasabah untuk simpanan di atas Rp2 milyar tidak dijaminakan oleh LPS

Tanggapan Manajemen:

BPR SUDAH melengkapi surat pernyataan atas persetujuan nasabah untuk simpanan di atas Rp2 milyar tidak dijaminakan oleh LPS.

4. KREDIT

a. SLIK/SID

Kondisi:

SLIK adalah Sistem Layanan Informasi Keuangan OJK yang memberikan informasi mengenai debitur terkait dengan kelancaran pembayaran kredit yang dimiliki debitur pada bank atau lembaga keuangan lainnya. Bank Perkreditan Rakyat belum sepenuhnya menjadikan SLIK sebagai kriteria dalam pengambilan keputusan kredit, hal ini tercermin dari masih adanya Debitur yang memiliki kredit yang bermasalah (macet) namun Bank tetap memberikan persetujuan fasilitas kredit, antara lain :

Nama	No. Rekening	Plafond	Baki Debit	Keterangan
Dedi Santoso	01.31.08859	20.000.000	20.000.000	Kol. 5 di PT Bank Rakyat Indonesiadan Kol. 5 di PT BCA Multifinance

Dasar Aturan:

1. Peraturan OJK No. 33 Th 2018 BAB II Cakupan KPB A No. 5 point d yang berbunyi Kebijakan mengenai kredit yang perlu dihindari, yaitu

Kredit kepada debitur bermasalah dan/ atau Debitur yang memiliki Kredit dengan kualitas macet pada BPR atau bank lain.

2. Kebijakan Perkreditan PT BPR Sinar Garuda Prima tanggal 1 Oktober 2019 point A. 1. 5. Kebijakan mengenai kredit yang perlu dihindari, d) Kredit kepada debitur bermasalah dan/ atau Debitur yang memiliki Kredit dengan kualitas macet pada BPR atau bank lain.

Rekomendasi:

Berdasarkan Peraturan OJK No. 33 Th 2018 dan Kebijakan Perkreditan PT BPR Sinar Garuda Prima tanggal 1 Oktober 2019, analisis Kredit harus dibuat secara lengkap, akurat, dan objektif paling sedikit memuat (1) informasi yang berkaitan dengan proyek atau usaha dan data pemohon termasuk hasil penelitian pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Sebaiknya pihak BPR lebih memperhatikan kondisi kolekibilitas pada SLIK calon nasabah pada BPR atau Bank lain agar bisa menghindari pemberian kredit kepada calon nasabah yang memiliki kredit dengan kualitas macet pada BPR atau bank lain sesuai peraturan yang berlaku.

Tanggapan Manajemen:

BPR akan lebih selektif untuk menerima kredit dengan memperhatikan kondisi kolekibilitas pada SLIK calon nasabah.

5. PENEMPATAN PADA BANK LAIN

Kondisi:

Terdapat rekening Penempatan pada Bank Lain atas nama selain PT BPR Sinar Garuda Prima yaitu atas nama Erlina Sari Sutono dengan Nomor Rekening 344-0322688.

Rekomendasi:

Sebaiknya pihak BPR membuat rekening atas nama BPR, tidak menggunakan nama pribadi untuk menghindari adanya benturan kepentingan.

Tanggapan Manajemen:

BPR sudah akan membuat rekening atas nama BPR di BCA namun hanya dapat dilakukan untuk jenis rekening GIRO namun rekening GIRO BCA tidak dapat megakomodir transaksi BPR salah satunya tidak dapat dilakukan pengecekan saldo secara online sehingga BPR tidak dapat memantau setiap hari jika ada dana masuk padahal peruntukan rekening BCA untuk menerima transfer angsuran kredit atau setoran tabungan nasabah serta tidak dapat melakukan transaksi secara online harus melalui cek/warkat untuk ditransaksikan di teller. Atas dasar tersebut BPR masih mempertahankan menggunakan rekening tabungan atas nama Erlina Sari Sutono dengan Nomor Rekening 344-0322688 sehingga pemantauan dana dapat diawasi oleh direksi dan bagian dana.

6. ASET TETAP

a. Kondisi:

Dari hasil pemeriksaan aset tetap terdapat beberapa inventaris yang harga perolehannya dibawah Rp 2.000.000,00.

Dasar Peraturan:

Standar Operasional Prosedur (SOP) Aset Tetap PT BPR Sinar Garuda Prima Tahun 2020 Tentang Kebijakan Aset Tetap Point 1 yang berbunyi “Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal dengan minimal nilai biaya perolehan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Rekomendasi:

Dalam menetapkan pengakuan aset tetap sebaiknya pihak BPR mengacu pada dasar peraturan yang sudah ada yaitu Standar Operasional Prosedur (SOP) Aset Tetap PT BPR Sinar Garuda Tahun 2020.

Tanggapan Manajemen:

BPR akan melakukan evaluasi terhadap aset tetap dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Aset Tetap PT BPR Sinar Garuda Prima Tahun 2020 terkait rekomendasi KAP.

Laporan Tahunan 2022

b. Kondisi:

Berdasarkan hasil perhitungan penyusutan aset tetap terdapat perbedaan penentuan *cut off* aset tetap yang mengakibatkan selisih perhitungan penyusutan aset menurut perhitungan klien dengan perhitungan audit. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Tanggal Perolehan	Nama Aset	Harga Perolehan	Nilai Buku Audit	Nilai Buku Klien	Selisih Penyusutan
30/07/2020	Sepeda Motor Beat	16.950.000	6.356.251	6.709.375	(353.124)
30/07/2020	Speaker Rockley 1	1.500.000	562.501	593.750	(31.249)
30/07/2020	Speaker Rockley 2	1.500.000	562.501	593.750	(31.249)
30/09/2020	Ventilaxing Fan Panasonic	990.000	701.250	711.549	(10.299)
30/09/2020	Ventilaxing Fan Panasonic	990.000	701.250	711.549	(10.299)

Dasar Peraturan:

Standar Operasional Prosedur (SOP) Aset Tetap PT BPR Sinar Garuda Prima Tahun 2020 BAB Pengelolaan Aset Tetap Tentang Prosedur Penetapan Metode Penyusutan dan Tarif Penyusutan point d yang berbunyi “Batas pengakuan tanggal penyusutan (*Cut Off*) aset tetap dan inventaris adalah setiap tanggal akhir bulan tahun takwim. Untuk menentukan waktu yang akan digunakan dalam perhitungan penyusutan aset yang diperoleh di tengah tahun, pendekatan yang dapat digunakan adalah Bulan Penggunaan, dengan pendekatan bulan

Laporan Tahunan 2022

penggunaan maka waktu penyusutan ditentukan berdasarkan bulan saat aset tersebut digunakan.

Rekomendasi:

Dalam perhitungan penyusutan aset tetap sebaiknya pihak BPR mengacu pada dasar peraturan yang sudah ada yaitu Standar Operasional Prosedur (SOP) Aset Tetap PT BPR Sinar Garuda Tahun 2020.

Tanggapan Manajemen:

BPR akan melakukan evaluasi terhadap aset tetap dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Aset Tetap PT BPR Sinar Garuda Prima Tahun 2020 terkait rekomendasi KAP.

7. PAJAK

Kondisi :

Pada tahun buku 2022 terdapat akun uang muka pajak sebesar Rp 5.380.138,- (lima juta tiga ratus delapan puluh ribu seratus tiga puluh delapan rupiah). Uang muka tersebut merupakan kelebihan bayar atas pajak PPh Badan di tahun 2022.

Dasar Aturan :

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak Bagian Ketiga Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak Melalui Pemindahbukuan Pasal 16 dan Pasal 17.

Rekomendasi :

Bank segera melakukan penyelesaian terhadap kelebihan bayar pada tahun 2022, bank dapat melakukan pemindahbukuan (Pbk) dengan melakukan permohonan secara tertulis dan disertai alasan pemindahbukuan.

Tanggapan Manajemen :

Laporan Tahunan 2022

Bank akan melakukan permintaan restitusi terhadap kelebihan bayar pada tahun 2022 dengan mekanisme Pengembalian Pendahuluan sesuai Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP pada saat pelaporan SPT tahunan 2022.

8. Asuransi

Kondisi :

Pada akun aset lain-lain terdapat pos tagihan kepada perusahaan asuransi sebesar Rp 333.313.669, tagihan tersebut merupakan saldo dari asuransi manulife milik bank. telah dilakukan pemeriksaan terhadap pencatatan dan ringkasan laporan rekening pada periode 31 Desember 2022, dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan selisih sebesar Rp1.807.287,-, selisih merupakan jumlah hasil pengembangan dan biaya yang belum dicatat oleh Bank Perkreditan Rakyat.

Rekomendasi :

Bank Perkreditan Rakyat sebaiknya melakukan jurnal penyesuaian terhadap saldo asuransi tersebut, sehingga saldo pada laporan keuangan Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan saldo sebenarnya pada perusahaan asuransi.

Tanggapan Manajemen :

BPR akan melakukan penyesuaian terhadap saldo untuk periode selanjutnya

LAMPIRAN

Laporan Tahunan 2022

PROFIL KOMISARIS

Nama Lengkap	: Dra. Erlina Sari Sutono
Jabatan	: Komisaris Utama
Nama Panggilan	: Erlina
Kewarganegaraan	: Indonesia
Usia	: 58 tahun
Tempat, Tanggal lahir	: Magelang, 9 Agustus 1963
Riwayat Pendidikan	: Memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta (1987).
Hubungan Afiliasi	: Tidak Memiliki hubungan keuangan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau pemegang saham pengendali BPR SINAR GARUDA.
Rangkap Jabatan	: Tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan, dan/atau lembaga lain.

Laporan Tahunan 2022

PROFIL KOMISARIS

Nama Lengkap	: Yosef Hening Krida Murdanto
Jabatan	: Komisaris
Nama Panggilan	: Yosef/ Hening
Kewarganegaraan	: Indonesia
Usia	: 37 tahun
Tempat, Tanggal lahir	: Tegal/ 06 Desember 1984
Riwayat Pendidikan	: Memperoleh gelar sarjana dalam bidang Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta (2009).
Hubungan Afiliasi	: Tidak Memiliki hubungan keuangan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau pemegang saham pengendali BPR SINAR GARUDA.
Rangkap Jabatan	: Tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan, dan/atau lembaga lain.

Laporan Tahunan 2022

PROFIL DIREKSI

Nama Lengkap	: Anton Stefian Dwi Kristanto, S.E.
Jabatan	: Direktur Utama
Nama Panggilan	: Anton / Fian
Kewarganegaraan	: Indonesia
Usia	: 35 tahun
Tempat, Tanggal lahir	: Jogjakarta, 16 Juli 1986
Riwayat Pendidikan	: Memperoleh gelar sarjana dalam bidang Akuntansi dari Universitas Pelita Harapan Karawaci-Tangerang (2005).
Hubungan Afiliasi	: Memiliki hubungan keuangan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau pemegang saham pengendali BPR SINAR GARUDA.
Rangkap Jabatan	: Tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan, dan/atau lembaga lain.

Laporan Tahunan 2022

PROFIL DIREKSI

Nama Lengkap	: R. Satriya Sambodo, SE.,MM.,
Jabatan	: Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan
Nama Panggilan	: Satriya
Kewarganegaraan	: Indonesia
Usia	: 60 tahun
Tempat, Tanggal lahir	: Purwodadi, 16 Agustus 1961
Riwayat Pendidikan	: Memperoleh gelar paca sarjana dalam bidang Sumber Daya Manusia dari Universitas IPWI Jakarta (2000).
Hubungan Afiliasi	: Tidak Memiliki hubungan keuangan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau pemegang saham pengendali BPR SINAR GARUDA.
Rangkap Jabatan	: Tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan, dan/atau lembaga lain.

PROFIL PEJABAT EKSEKUTIF KEPATUHAN

Nama Lengkap : Inneke Putri Rahmawati
Jabatan : PE Kepatuhan
Nama Panggilan : Inne
Kewarganegaraan : Indonesia
Usia : 35 tahun
Tempat, Tanggal lahir : Magelang, 16 November 1986
Riwayat Pendidikan : Memperoleh gelar sarjana dalam bidang Akuntansi dari Universitas Muhammadiyah Magelang (2010).

PROFIL PEJABAT EKSEKUTIF MANAJER BISNIS

Nama Lengkap : Wahyu Ruli Nova Zendi Sutjipto, S. Ei.
Jabatan : PE Manajer Bisnis
Nama Panggilan : Zendi
Kewarganegaraan : Indonesia
Usia : 33 tahun
Tempat, Tanggal lahir : Magelang, 13 Agustus 1988
Riwayat Pendidikan : Memperoleh gelar sarjana dalam bidang Manajemen Keuangan Islam dari STEI TAZKIA, Bogor (2011).

PROFIL PEJABAT EKSEKUTIF PIMPINAN KANTOR CABANG

Nama Lengkap : Yunas Efendi, S.Kom
Jabatan : PE Pimpinan Kantor Cabang Mertoyudan
Nama Panggilan : Yunas
Kewarganegaraan : Indonesia
Usia : 34 tahun
Tempat, Tanggal lahir : Magelang, 03 Maret 1987
Riwayat Pendidikan : Memperoleh gelar sarjana dalam bidang Sistem Informasi dari STMIK Bina Patria Magelang (2013).

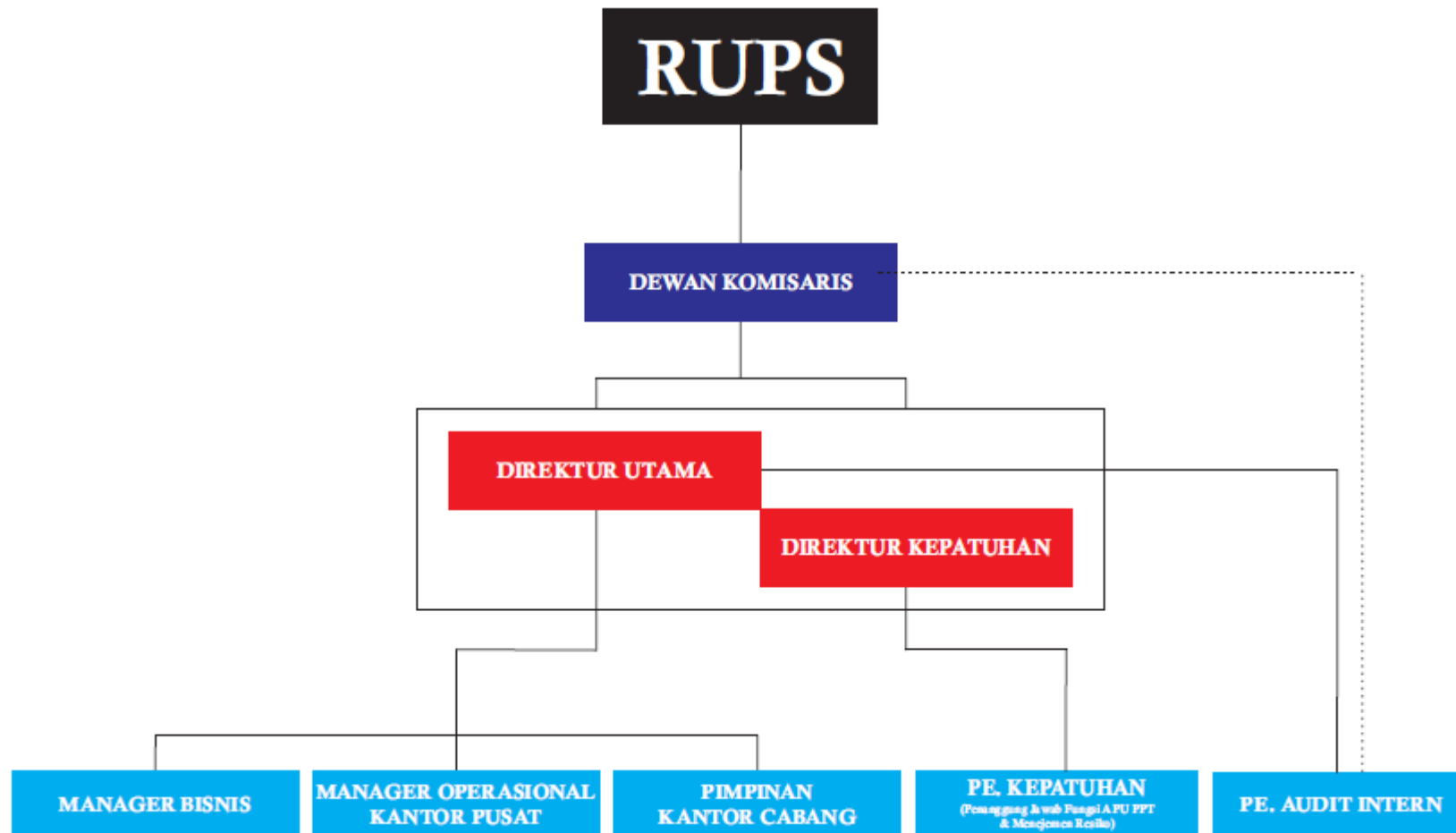
PROFIL PEJABAT EKSEKUTIF MANAJER OPERASIONAL

Nama Lengkap : Dewi Utami Hartati
Jabatan : PE Manajer Operasional Kantor Pusat
Nama Panggilan : Dewi
Kewarganegaraan : Indonesia
Usia : 33 tahun
Tempat, Tanggal lahir : MAGELANG, 01 AGUSTUS 1989
Riwayat Pendidikan : SMUN 3 MAGELANG (2007).

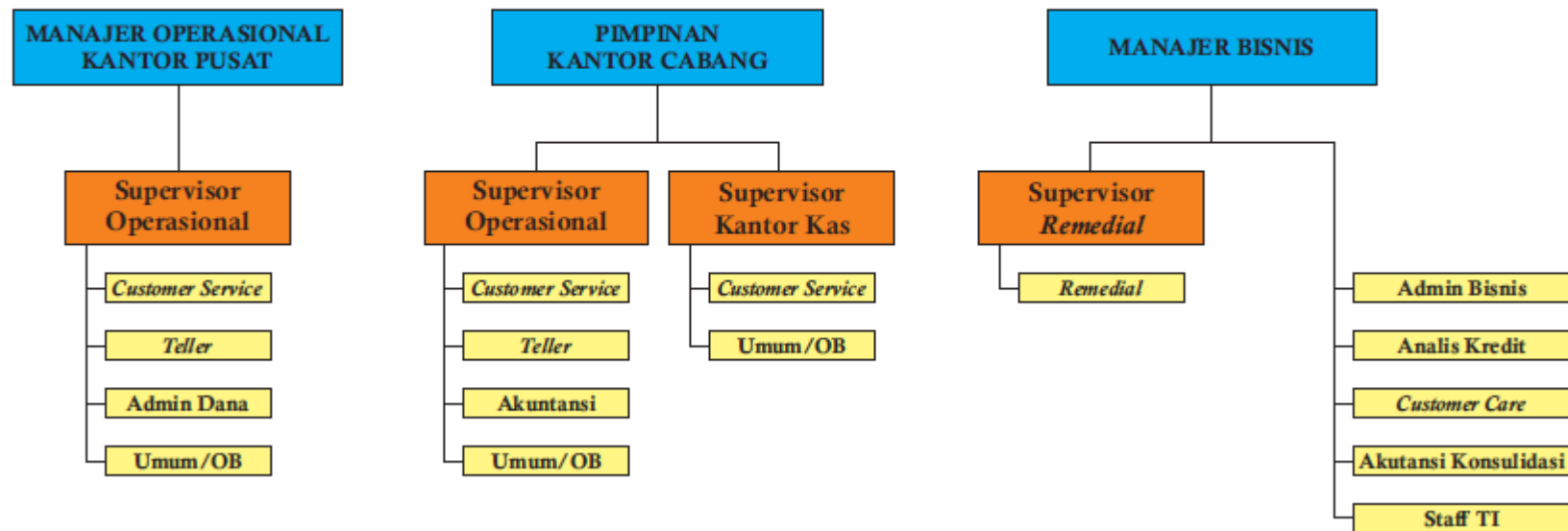
PROFIL PEJABAT EKSEKUTIF AUDIT INTERNAL

Nama Lengkap : Silfiana
Jabatan : PE Audit Internal
Nama Panggilan : Silfi
Kewarganegaraan : Indonesia
Usia : 29 tahun
Tempat, Tanggal lahir : Magelang, 17 Desember 1993
Riwayat Pendidikan : Memperoleh gelar sarjana dalam bidang akuntansi dari Universitas Negeri Yogyakarta (2015).

STRUKTUR ORGANISASI



DETAIL STRUKTUR



DAFTAR KARYAWAN

31 Desember 2022

No	Nama	Jabatan
1	DRA. ERLINA SARI SUTONO	Komisaris Utama
2	YOSEF HENING KRIDA MURDANTO	Komisaris
3	ANTON STEFIAN D. K., S.E.	Direktur Utama
4	SATRIYA SAMBODO	Direktur
5	EKANTARI YUANITA WIDYASTUTI	SPV Remedial
6	INNEKE PUTRI RAHMAWATI	PEK
7	W. R. N. ZENDI SUTJIPTO	Manager Bisnis
8	YUNAS EFENDI	Pimpinan Cabang
9	IMROATUL KHASANAH	Bagian Umum
10	MIMIN SAPUTRI	Pembukuan
11	HESTI SETIYANINGSIH	Supervisor
12	RANGGA SAMBODO	Collection Lending
13	NASTANGIN	Bagian Umum
14	PERA APRILIYANTI	Adm Funding
15	EKA DEASY HADIANI	Admin Bisnis
16	DEWI UTAMI HARTATI	Manager Operasional Kantor Pusat
17	JOKO TRI PURWANTO	IT
18	NUR ROCHMAT FAJAR SIDIQ	Collection Lending
19	TANDA WIDI PRIYATNA	Spv Analisis Kredit
20	SILFIANA	PEAI
21	DHITA RIZKY WULAN	Teller
22	ANGGI DWI WARIYATI	Spv Operasional
23	SUCI RATNA KINANTI	Customer Care
24	MUHAMMAD NURROHMAN	SPV Marketing
25	ANINDYA AYU KEMALASARI	Accounting
26	INDRAJAT SAPUTRO	AO Lending
27	KURNIA PUJI LESTARI	Spv Operasional
28	LUTFI RAHARDIAN	Collection
29	KISWANTO	AO Lending
30	EFITA DEWI	Marketing
31	KARINA DIONE NATANIA	CS
32	RESTU HARYO SETYABUDI	AO Lending
33	DWI PRASETYA NUGROHO	AO Lending
34	ZENI KURNIAWAN	Marketing

Laporan Tahunan 2022

35	YOSAFAT HARRIS SEPTI NUGROHO	<i>Marketing</i>
36	JENNIA INTAN PRAITA	<i>Customer Service</i>
37	BRIGITA MENANTI ASSAVELLA PARAMITHA	<i>Teller</i>
38	SYARIF HIDAYAT	<i>Bagian Umum</i>
39	RIDHA SAVA AULIA	<i>Bagian Umum</i>

**Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance*
(GCG)**

Bank Perkreditan Rakyat SINAR GARUDA



Tahun 2023

Periode : 01 Januari s/d 31 Desember 2022

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA – GOOD CORPORATE
GOVERNANCE (GCG)
BPR SINAR GARUDA TAHUN 2022**

BAB I

PENDAHULUAN

Bank merupakan lembaga intermediasi yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan (tabungan dan deposito) dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari definisi bank tersebut dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat untuk dapat menyimpan uangnya pada Bank tersebut. Saat ini kompleksitas kegiatan usaha Bank semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan perkembangan jenis produk dan jasa. Peningkatan kompleksitas kegiatan usaha Bank memberikan dampak yang sangat besar terhadap eksposur risiko yang akan dihadapi oleh Bank, sehingga diperlukan kompetensi semua organisasi pada Bank dalam melakukan upaya untuk memitigasi risiko kegiatan Bank. Bank yang tidak dikelola dengan baik, sudah pasti akan memicu munculnya satu atau lebih risiko yang dihadapi Bank yang nantinya akan menimbulkan kerugian pada Bank serta kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, PT. BPR Sinar Garuda Prima, untuk melindungi *stakeholders* dan meningkatkan Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, maka Bank selalu berupaya untuk melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada Prinsip Tata Kelola Perusahaan atau *Good Corporate Governance* (GCG) berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor : 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor : 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR), yang mewajibkan semua Bank melaksanakan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam setiap kegiatan usahanya. Dengan adanya Peraturan dan Surat Edaran tersebut PT. BPR Sinar Garuda Prima setiap tahunnya membuat Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG). Laporan ini berisi tentang Pelaksanaan Tata Kelola *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT. BPR Sinar Garuda Prima.

Seluruh karyawan bank mulai dari jajaran Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan seluruh karyawan PT. BPR Sinar Garuda Prima berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan/*Good Corporate Governance* (GCG) yang baik dan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dalam kegiatan bisnis sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai pokok yang tertuang dalam *Good Corporate Governance* (GCG). Penilaian *Good Corporate Governance* (GCG) dilakukan dengan metode *self-assesment* berdasarkan laporan-laporan dan bukti dokumen pendukung lainnya. Penilaian tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penilaian Tingkat Kesehatan Bank (TKS).

Laporan ini dibuat dengan tujuan dapat digunakan untuk kepentingan *stakeholders* guna mengetahui kinerja bank, tingkat Kepatuhan (*compliance*) terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan serta pelaksanaan prinsip dasar *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran.

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) secara konsisten pada kondisi persaingan yang ketat akan memperkuat daya saing perusahaan, memaksimalkan nilai perusahaan, mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efisien dan efektif, yang pada akhirnya akan memperkuat kepercayaan Pemegang Saham dan *Stakeholders* sehingga PT. BPR Sinar Garuda Prima dapat beroperasi dan tumbuh secara berkesinambungan dalam jangka panjang.

Secara singkat kami uraikan prinsip-prinsip dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) PT. BPR Sinar Garuda Prima, sebagai berikut :

1. **Keterbukaan (*Transparency*)**

Yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, mudah diperbandingkan serta mudah diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan haknya. Prinsip keterbukaan oleh Bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia Bank sesuai Undang-Undang yang berlaku.

2. **Akuntabilitas (*Accountability*)**

Yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban Bank, sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Bank memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan *corporate values*, sasaran dan usaha serta strategi Bank. Dalam hubungan ini Bank menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan serta memastikan terdapatnya *check and balance* dalam pengelolaan Bank.

3. **Tanggung Jawab (*Responsibility*)**

Yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat. Sebagai wujud pertanggung jawaban Bank untuk menjaga kelangsungan usahanya yang berpegang pada prinsip kehati-hatian dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank harus bertindak sebagai *good corporate citizen* (warga negara perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.

4. **Independensi (*Independency*)**

Yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders* manapun, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*), dan setiap keputusan diambil berdasarkan objektivitas serta bebas dari tekanan dari pihak manapun.

5. **Kewajaran (*Fairness*)**

Yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank memperhatikan kepentingan

seluruh *stakeholders* berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*) serta memberikan/menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank atau mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

Sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Perihal : Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Bank Perkreditan Rakyat wajib melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 POJK Tata Kelola BPR paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun. Ruang Lingkup Penilaian sendiri (*Self Assesment*) Pelaksanaan Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) adalah :

- i. Pendahuluan
- ii. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
- iii. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Direksi
- iv. Penerapan Fungsi Kepatuhan
- v. Penerapan Fungsi Audit Intern
- vi. Penerapan Fungsi Audit Ekstern
- vii. Aspek Transparasi dalam Penerapan GCG
- viii. Frekuensi Rapat Pengurus
- ix. Batas Maksimum Pemberian Kredit
- x. Penyimpangan, Kondisi Keuangan dan Non Keuangan
- xi. Rencana Bisnis Bank (RBB)
- xii. Kesimpulan

BAB II

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMISARIS

Susunan Organisasi Dewan Komisaris

Susunan Dewan Komisaris PT. BPR Sinar Garuda Prima pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan
1	Dra. Erlina Sari Sutono	Komisaris Utama	06 Juli 2018 sd 06 Juli 2023
2	Yosef Hening Krida M, Spd	Komisaris	01 September 2021 sd 01 September 2026

Persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Komisaris pada PT. BPR Sinar Garuda Prima sudah terpenuhi, dengan gambaran sebagai berikut :

1. Jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 2 (dua) orang dipimpin oleh Komisaris Utama dan semua anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia.
2. Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Dewan Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank sehingga tidak mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Keberadaan Komisaris Independen ini dapat menciptakan *Check and Balance*, menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugasnya serta melindungi kepentingan *stakeholders*.
3. Semua anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).
 - Ibu Dra. Erlina Sari Sutono menjabat sebagai Komisaris Utama setelah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat dengan Nomor : SR-149/KR.0313/2018 tertanggal 09/07/2018 (sembilan Juli dua ribu delapan belas) dengan Nomor : KEP-144/KR.03/2018.
 - Bp. Yosef Hening Krida M, Spd sebagai Komisaris setelah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tertanggal 13/08/2021 (tiga belas Agustus dua ribu dua puluh satu) Nomor : KEP-97/KR.03/2021.
4. Tidak ada anggota Dewan Komisaris merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Dewan Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan.

Selain persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Komisaris seperti yang ditentukan oleh Bank Indonesia, semua anggota Dewan Komisaris memenuhi

persyaratan Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan untuk kepentingan Bank dapat dilaksanakan dengan baik.

5. Secara kolektif telah bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi serta memastikan bahwa BPR telah melaksanakan *Good Corporate Governance* (GCG). Dalam melakukan Semua anggota Dewan Komisaris memiliki Integritas paling kurang mencakup:
 - a. Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - b. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat;
 - d. Tidak termasuk dalam tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*).
6. Semua anggota Dewan Komisaris memiliki Kompetensi paling kurang mencakup:
 - a. Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - b. Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan;
 - c. Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat.
7. Semua anggota Dewan Komisaris memiliki Reputasi keuangan paling kurang mencakup, sebagai berikut :
 - a. Tidak memiliki kredit macet;
 - b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
8. Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan pengawasan Komisaris telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
9. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawas dan penasehat, Dewan Komisaris tidak terlibat dalam mengambil keputusan kegiatan operasional, kecuali :
 - a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit; dan
 - b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar BPR atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Keterlibatan atau persetujuan Dewan Komisaris dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional merupakan bagian dari tugas dan pengawasan Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi dalam melaksanakan kepengurusan BPR. Tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris tersebut merupakan upaya pengawasan dini yang perlu dilaksanakan.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan *Good Corporate Governance* (GCG) yakni sebagai berikut :

1. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.
2. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola yang baik pada setiap kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
3. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi serta memberikan nasehat kepada Dewan Direksi.
4. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
5. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tetap menjadi tanggung jawab Dewan Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
6. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Dewan Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern Bank Perkreditan Rakyat (BPR), auditor eksternal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan atau otoritas lainnya.
7. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
8. Anggota komisaris baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu pada jam kerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR) berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang digunakan atau dikuasai oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lainnya serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan Dewan Direksi.
9. Dewan Komisaris dapat meminta Dewan Direksi, setiap anggota Direksi dan atau jajaran manajemen untuk memberikan penjelasan tentang segala hal mengenai Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas mereka.
10. Dewan Komisaris wajib mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi.
11. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan perlindungan kepada konsumen atau nasabah.
12. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang mengatur tentang :
 - a. Pengaturan Etika Kerja
 - b. Waktu Kerja
 - c. Pengaturan Rapat

Rekomendasi Dewan Komisaris

Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Dewan Direksi sehubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya antara lain :

1. Penunjukan Auditor Eksternal, yaitu Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP).
2. Persetujuan Perubahan Ketentuan yang Mengatur tentang Hak-hak dan Fasilitas Komisaris dan Direksi.
3. Persetujuan RUPS.
4. Persetujuan penjualan dan/atau penghapusan aktiva tetap.
5. Persetujuan berbagai penyimpangan dalam operasional dan kredit tetapi tidak melanggar atau melampaui ketentuan yang berlaku di atasnya.

BAB III

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi

Susunan Dewan Direksi PT. BPR Sinar Garuda Prima pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) adalah sebagai berikut :

Susunan Organisasi Dewan Direksi

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan
1	Anton Stefian Dwi K, SE	Direktur Utama	06 Juni 2018 sd 06 Juni 2023
2	Satriya Sambodo, SE., MM	Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan	02 Januari 2020 sd 02 Januari 2025

Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi

Persyaratan Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Direksi seperti yang ditentukan oleh Bank Indonesia telah terpenuhi, dengan gambaran sebagai berikut :

1. Jumlah anggota Dewan Direksi sebanyak 2 (dua) orang dipimpin oleh Direktur Utama dan semua anggota Direksi berdomisili di Indonesia.
2. Direktur Utama serta Anggota Direksi lainnya berasal dari pihak yang independen yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, sehingga tidak mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
3. Semua Anggota Dewan Direksi memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).
 - Anton Stefian Dwi K, S.E disetujui oleh Bank Indonesia menjabat sebagai Direktur Utama melalui Surat Bank Indonesia No. 15/196/DKBU/IDAd/SM/RAHASIA dan Keputusan Gubernur Bank Indonesia tertanggal 16 Mei 2013 Nomor : 15/59/KEP.GBI/SM/2013/Rahasia dan diangkat oleh RUPS tanggal 11 Juni 2013.
 - Satriya Sambodo SE., MM disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan menjabat sebagai Anggota Direksi dan yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan berdasarkan keputusan Dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP.203/KR.03/2019 Tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan tanggal 29 November 2019 dan diangkat oleh RUPS tanggal 02 Januari 2020.
4. Tidak ada anggota Dewan Direksi merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Dewan Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembag/perusahaan bukan lembaga keuangan.

5. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama memiliki saham pada Bank dan/atau pada suatu perusahaan lain. Sesuai ketentuan POJK No. 60/POJK.04/2015 tentang keterbukaan informasi pemegang saham tertentu. Kepemilikan saham Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak boleh melebihi 25 (dua puluh lima) % dari seluruh saham Bank.
6. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Seperti sebagaimana yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) melalui Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016. Kompetensi dan Integritas Anggota Direksi, yang menyebut "Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Pemberian kuasa umum dimaksud adalah pemberian kuasa kepada satu orang karyawan atau lebih atau orang lain yang mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang dan tanggung jawab Direksi secara menyeluruh tanpa batas ruang lingkup dan waktu".

Selain persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi seperti yang ditentukan oleh Bank Indonesia, Direksi Bank memenuhi persyaratan berupa Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan, dengan gambaran sebagai berikut :

7. Semua Anggota Direksi memiliki Integritas paling kurang mencakup :
 - a. Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - b. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat;
 - d. Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).
8. Semua Anggota Direksi memiliki Kompetensi paling kurang mencakup :
 - a. Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - b. Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan;
 - c. Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat.
9. Semua Anggota Direksi memiliki Reputasi Keuangan paling kurang mencakup :
 - a. Tidak memiliki kredit macet;
 - b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
10. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap Anggota Direksi yang mengatur tentang :
 - a. Pengaturan etika kerja
 - b. Waktu kerja
 - c. Pengaturan rapat

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan *Good Corporate Governance* (GCG) yakni sebagai berikut :

1. Direksi telah mempertanggungjawabkan kepengurusannya dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan sesuai dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
3. Direksi telah mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).
4. Direksi senantiasa menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Audit Intern, Auditor Eksternal dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
5. Direksi senantiasa menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan oleh Dewan Komisaris.
6. Direksi melakukan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam setiap kegiatan usaha Bank perkreditan Rakyat (BPR) pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

BAB IV

PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

Sebagai tindak lanjut dari Penerapan Tata Kelola, kelengkapan dan pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, Manajemen Risiko dan APU PPT BPR Sinar Garuda sebagai berikut :

NO	NAMA PEJABAT EKSEKUTIF	JABATAN	NOMOR SURAT KEPUTUSAN	TANGGAL SK	TANGGAL BERLAKU
1	Inneke Putri Rahmawati, SE	PE Kepatuhan	No. 023/Kep-Dir-SK-INT/III/2017	31/03/2017	01/04/2017
2	Inneke Putri Rahmawati, SE	PE Manajemen Risiko	No. 006/Kep-Dir-SK-INT/II/2018	22/02/2018	22/02/2018
3	Inneke Putri Rahmawati, SE	PE APU PPT	No. 022/Kep-Dir-SK-INT/III/2020	12/03/2020	12/03/2020

Keterangan :

Pejabat Eksekutif Kepatuhan BPR Sinar Garuda merangkap sebagai Pejabat Pelaksana yang membawahkan Manajemen Risiko dan APU PPT.

Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Eksekutif Kepatuhan, Manajemen Risiko, dan APU PPT

- Pejabat Pelaksana Fungsi Kepatuhan
Tugas dan tanggung jawab Pejabat Pelaksana Fungsi Kepatuhan sebagai berikut :
 1. Menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.
 2. Memantau dan memahami setiap perkembangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan kegiatan usaha BPR.
 3. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.
 4. Memastikan bahwa masing-masing unit kerja sudah melakukan penyesuaian ketentuan intern dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.
 5. Memberikan konsultasi kepada unit kerja atau pegawai BPR mengenai kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan.
 6. Memberikan rekomendasi untuk produk, aktivitas dan transaksi BPR sesuai peraturan perundang-undangan.

7. Memastikan penerapan prosedur kepatuhan pada setiap unit kerja BPR.
 8. Melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang menangani Fungsi Audit Intern terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR.
- **Pejabat Pelaksana Fungsi Manajemen Risiko**
Tugas dan tanggung jawab Pejabat Pelaksana Fungsi Manajemen Risiko sebagai berikut :
1. Pemantauan pelaksanaan kebijakan dan prosedur penerapan Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Direksi.
 2. Pemantauan posisi Risiko secara keseluruhan, per jenis risiko dan per jenis aktivitas fungsional.
 3. Pengkajian usulan penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru.
 4. Penyampaian rekomendasi kepada satuan kerja atau pegawai yang menangani fungsi operasional dan Komite Manajemen Risiko sesuai kewenangan yang dimiliki.
 5. Penyusunan dan penyampaian laporan profil risiko secara berkala kepada anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Manajemen Risiko dan/atau Komite Manajemen Risiko.
- **Pejabat Fungsi APU PPT**
Tugas dan tanggung jawab Pejabat Penanggungjawab Fungsi APU PPT sebagai berikut :
1. Pemantauan pelaksanaan kebijakan dan prosedur APU PPT.
 2. Memastikan pengkinian data dan profil Nasabah serta data dan profil transaksi Nasabah.
 3. memastikan bahwa formulir yang berkaitan dengan Nasabah telah mengakomodasi data yang diperlukan dalam penerapan program APU PPT.
 4. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan dan analisis transaksi Nasabah untuk memastikan ada atau tidak adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan.
 5. Memastikan seluruh kegiatan dalam rangka penerapan Program APU PPT terlaksana dengan baik.

BAB V

PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

Fungsi Audit Intern

Sebagai tindak lanjut dari Penerapan Tata Kelola, selain kelengkapan dan pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, Manajemen Risiko dan APU PPT, Bank memiliki Fungsi Audit Intern, sebagai berikut:

NO	NAMA PEJABAT EKSEKUTIF	JABATAN	NOMOR SURAT KEPUTUSAN	TANGGAL SK	TANGGAL BERLAKU
1	Silfiana, SE	PE Audit Intern	No. 004/Kep-Dir-SK-INT/II/2020	20/01/2020	28/01/2020

➤ Pejabat Pelaksana Fungsi Audit Intern

Tugas dan tanggung jawab Pejabat Pelaksana Fungsi Audit Intern sebagai berikut :

1. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR yang mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun hasil audit.
2. Membantu analis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisa dokumen.
3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
5. Menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.

BAB VI

PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

Fungsi Audit Ekstern

Bank membutuhkan auditor ekstern yang akan mengaudit laporan keuangan pada Bank tersebut setiap tahunnya oleh Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan mekanisme penunjukan sebagai berikut :

- a. Bank telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melaksanakan Audit Laporan keuangan Bank secara independent.
- b. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) ini sebelumnya direkomendasikan oleh Dewan Direksi dan diajukan kepada Dewan Komisaris yang kemudian hasil dari penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) tersebut dituangkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- c. Kantor Akuntan Publik (KAP) telah menyampaikan hasil audit kepada Bank tepat waktu dan mampu bekerja secara independent.
- d. Pemilihan Kantor Akuntan Publik (KAP) ini sesuai dengan Pasal 28 ayat 1 POJK Nomor 13/ POJK.03/ 2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dan Lampiran Surat Edaran OJK Nomor 36/ SEOJK.03/ 2017 dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

BAB VII

ASPEK TRANSPARANSI DALAM PELAKSANAAN GCG

Aspek transparansi sebagai salah satu prinsip pokok dalam melaksanakan *Good Corporate Governance* (GCG), diuraikan sebagai berikut :

Kepemilikan Saham Dewan Direksi :

No	Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham %
1	Anton Stefian Dwi K, SE	Direktur Utama	20%
2	Satriya Sambodo, SE., MM	Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan	0%

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris :

No	Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham
1	Dra. Erlina Sari Sutono	Komisaris Utama	15%
2	Yosef Hening Krida M, Spd	Komisaris	0%

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi BPR berasal dari kalangan profesional dan seluruh Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi BPR tidak memiliki hubungan keuangan berupa, bantuan keuangan, atau pinjaman dari Anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau Anggota Direksi BPR lainnya.

Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS.

Jaspro adalah laba perusahaan/bonus dimana dalam setiap 1 (satu) tahun sekali akan dibagikan kepada pengurus, dengan skema jasa produksi dibagikan apabila laba bersih setelah pajak. Penetapan jasa produksi untuk pengurus ditentukan dengan beberapa tahapan. Penetapan jasa produksi ini sudah diatur dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Nomor : 24 tanggal 27 Juni 2019.

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Rasio gaji Dewan Komisaris tertinggi & terendah = 2,00x

Rasio gaji Dewan Direksi tertinggi & terendah = 1,25x

Rasio gaji pegawai tertinggi & terendah = 2,53x

Rasio gaji Direksi & Komisaris tertinggi = 2,50x

Rasio gaji Direksi & pegawai tertinggi = 3,75x

Jumlah keseluruhan gaji pengurus selama tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) sebesar Rp. 602.231.600,.

BAB VIII

FREKUENSI RAPAT PENGURUS TAHUN 2022

Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) Dewan Komisaris telah mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali dengan data sebagai berikut :

No	Nama	Jumlah Rapat	Tidak Hadir	% Hadir
1	Dra. Erlina Sari Sutono	4	-	100%
2	Yosef Hening Krida M, Spd	4	-	100%

Frekuensi Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Sepanjang tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) Dewan Komisaris dan Direksi telah mengadakan rapat sebanyak 3 (tiga) kali dengan data sebagai berikut :

No	Nama	Jumlah Rapat	Tidak Hadir	% Hadir
1	Dra. Erlina Sari Sutono	3	-	100%
3	Yosef Hening Krida M, Spd	3	-	100%
4	Anton Stefian Dwi K, SE	3	-	100%
5	Satriya Sambodo, SE., MM	3	-	100%

Frekuensi Rapat Dewan Direksi

Sepanjang tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) Dewan Direksi telah mengadakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali dengan data sebagai berikut :

No	Nama	Jumlah Rapat	Tidak Hadir	% Hadir
1	Anton Stefian Dwi K, SE	12	-	100%
2	Satriya Sambodo, SE., MM	12	-	100%

Rapat Dewan Direksi pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) dilaksanakan setiap 1 (satu) bulan sekali, dengan mempertimbangkan pokok pembahasan yang aktual dan terjadi dalam dunia Perbankan. Rapat Dewan Direksi dapat menghasilkan SK maupun SE untuk diterapkan pada Bank.

BAB IX

BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

Batas Maksimum Pemberian Kredit

Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) adalah persentase maksimal realisasi penyediaan dana terhadap modal Bank yang mencakup kredit dan penempatan dana Bank di Bank lain. Pelanggaran BMPK yaitu selisih lebih persentase penyediaan dana pada saat direalisasikan terhadap modal Bank dengan persentase BMPK. Pelampauan BMPK yaitu selisih antara persentase penyediaan dana yang telah direalisasikan terhadap modal Bank pada saat tanggal laporan dengan persentase BMPK, dan penyediaan dana tersebut tidak melanggar BMPK pada saat direalisasikan. Bank dilarang membuat perjanjian kredit yang dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran BMPK. Bank dilarang memberikan penyediaan dana yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran BMPK. Adapun ketentuannya sebagai berikut:

- Penyediaan dana kepada pihak terkait ditetapkan paling tinggi 10% dari modal BPR
- Penyediaan Dana dalam bentuk Penempatan Dana Antar Bank kepada BPR lain yang merupakan Pihak Tidak Terkait ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Modal BPR
- Penyediaan Dana dalam bentuk Kredit kepada 1 (satu) Peminjam Pihak Tidak Terkait ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Modal BPR. Penyediaan dana dalam bentuk kredit kepada 1 (satu) kelompok peminjam pihak tidak terkait ditetapkan paling tinggi 30% dari Modal Bank

PT. BPR Sinar Garuda Prima, selama tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) dalam menyalurkan dananya belum pernah melampaui Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), begitu juga pada tahun-tahun sebelumnya.

BAB X

PENYIMPANGAN, KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Bank pasti bekerjasama dengan pihak lain, sesuai dengan porsi dan job desk masing-masing. Baik itu antar masing-masing Sumber Daya Manusia (SDM) dalam bank maupun dengan pihak luar. Bank perlu menghindari adanya beberapa hal, diantaranya:

Penyimpangan Internal

Penyimpangan Internal (*internal fraud*) yaitu penyimpangan/kecurangan terkait keuangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap (*honorer/outsourcing*). Tidak ada penyimpangan internal (*internal fraud*) yang dilakukan di BPR Sinar Garuda selama tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua).

Internal Fraud	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
	Pengurus		Pegawai tetap		Pegawai tidak tetap	
	Thn sebelumnya	Thn laporan	Thn sebelumnya	Thn laporan	Thn sebelumnya	Thn laporan
dalam 1 tahun						
Total Fraud	-	-	-	-	-	-
Telah diselesaikan	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal BPR	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-

Permasalahan Hukum

Permasalahan hukum baik hukum perdata maupun hukum pidana yang dihadapi PT. BPR Sinar Garuda Prima selama periode tahun laporan yaitu tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) dan telah diajukan melalui proses hukum, serta upaya penyelesaiannya. Selama tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) Bank belum pernah memperoleh permasalahan hukum.

Permasalahan Hukum	Jumlah Pidana	Jumlah Perdata
Telah selesai (telah punya kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-

Benturan Kepentingan

Sampai saat ini PT. BPR Sinar Garuda Prima belum pernah menangani transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang terjadi selama tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). Benturan kepentingan yang mencakup nama dan jabatan pihak yang memiliki benturan kepentingan, nama dan jabatan pengambil keputusan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, jenis transaksi, nilai transaksi dan keterangan belum pernah terjadi selama tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). Sampai saat ini pada PT. BPR Sinar Garuda Prima selalu berusaha untuk menghindari transaksi yang mengandung potensi benturan kepentingan.

No	Nama dan Jabatan yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jutaan Rupiah	Nilai Transaksi (jutaan rupiah)	Keterangan
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-

Pemberian dana untuk kepentingan sosial dan kegiatan politik

- Pemberian dana untuk kepentingan sosial :

Selama tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) PT. BPR Sinar Garuda Prima telah memberikan sumbangan untuk kepentingan sosial, diantaranya:

- Pemberian sumbangan Kambing Qurban di wilayah Marongan, Kabupaten Magelang
- Sumbangan penggalangan dana untuk pembangunan Masjid di Dusun Semen, Kabupaten Magelang
- Pemberian bingkisan kepada nasabah sebagai sarana mempererat silaturahmi dengan nasabah

- Pemberian dana untuk kegiatan politik :

PT. BPR Sinar Garuda Prima pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) belum pernah memberikan dana untuk segala jenis kegiatan yang berhubungan dengan politik. Pada tahun-tahun sebelumnya bank juga belum pernah memberikan dana untuk segala jenis kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan politik.

- Pemberian dana untuk event :

PT. BPR Sinar Garuda Prima, selama tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) minim membuat event, dikarenakan masih adanya PPKM dampak dari adanya pandemi Covid-19. Sebagai sarana pengembangan produk, literasi dan inklusi keuangan dilaksanakan melalui zoommeeting.

Event pertama yang diadakan pada bulan Oktober 2022 di Desa Marongan, Kabupaten Magelang, yang melibatkan seluruh nasabah PT. BPR Sinar Garuda Prima.

BAB XI

RENCANA BISNIS BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR)

Bank telah memiliki Rencana strategis dalam bentuk Rencana Bisnis Jangka Pendek yang telah disusun secara periodik yang sesuai dengan Visi dan Misi PT. BPR Sinar Garuda Prima. Beberapa faktor penting yang menjadi perhatian dalam pengembangan Rencana Bisnis di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) adalah:

- a. Penurunan rasio NPL karena beberapa kredit bermasalah dapat terselesaikan.
- b. Peningkatan fungsi intermediasi bank sebagai penyalur atau penghubung antara pihak yang memiliki dana atau ingin menyimpan dana dalam bentuk tabungan dan/atau deposito dengan pihak yang sedang membutuhkan dana dalam bentuk pinjaman/kredit.
- c. Strategi Penyaluran Kredit atau Pembiayaan Berdasarkan Jenis Usaha, Bank membidik sasaran pada sektor pertanian karena dilihat dari segi geografisnya Kota Magelang merupakan kota dimana masih banyak lahan-lahan pertaniannya dari pada pertokoan dan pusat perbelanjaan. Masih banyak penduduknya yang berprofesi sebagai petani.
- d. Upaya Bank dalam meningkatkan penyaluran kredit dengan meluncurkan beberapa promo kredit yang banyak diminati oleh masyarakat, dengan mengedepankan pelayanan cepat, tepat, akurat serta suku bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan produk kredit yang dimiliki bank sebelumnya.
- e. Strategi pengembangan bisnis, Bank meluncurkan produk baru sebagai bentuk penghimpunan dana tahunan, yaitu TAHARA “ Tabungan Hari Raya” di tahun 2019 (dua ribu sembilan belas). Produk TAHARA ini diminati oleh semua kalangan masyarakat. Tahun 2020 (dua ribu dua puluh) program TAHARA 2 dapat terlaksana dengan baik. Tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) program TAHARA 3 masih berlanjut dengan target yang semakin tinggi dan target pun dapat tercapai. Di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) program TAHARA tetap berjalan dengan hasil yang lebih banyak lagi.

PT. BPR Sinar Garuda Prima akan menyusun pembuatan Rencana Bisnis untuk Jangka Menengah 3 (tiga) tahun dan 5 (lima) tahun, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 37/POJK.03/2016 Tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

BAB XII

KESIMPULAN

Dari hasil penilaian atas pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) PT. BPR Sinar Garuda Prima memperoleh nilai komposit 1,8 (satu koma delapan) dengan peringkat 2 (dua) atau berpredikat “baik”. Hal ini dikarenakan Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di PT. BPR Sinar Garuda Prima secara umum telah dilaksanakan dengan baik.

Dalam menjalankan usahanya di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) PT. BPR Sinar Garuda Prima telah melaksanakannya secara optimal, namun masih terdapat beberapa kendala diantaranya :

1. Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang persyaratan Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi serta Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi dapat dipenuhi oleh Bank. Komposisi Dewan komisaris dan Dewan Direksi sudah sesuai ketentuan.
2. Bank berencana melengkapi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang belum ada dan akan segera direalisasikan pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), akan tetapi belum semuanya terealisasi. Diharapkan kedepannya dapat merealisasikan seluruh Standar Operasional Prosedur (SOP) tersebut sehingga Tata Kelola Bank akan berjalan dengan baik.
3. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien, untuk rapat sudah dapat memenuhi agenda rapat Komisaris sudah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) sehingga semua hasil rapat tersebut dapat menjadi acuan rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi.
4. Bank sudah melakukan penunjukan Pejabat Eksekutif yang membawahi Fungsi Kepatuhan dan Pejabat Eksekutif Audit Intern. Telah ditunjuk juga Pejabat Eksekutif untuk Fungsi Manajemen Risiko dan Fungsi APU PPT yang penunjukannya sudah dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
5. Tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan selama tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) di PT. BPR Sinar Garuda Prima.
6. Tidak ada permasalahan hukum secara pidana baik dari sisi internal maupun sisi eksternal Bank.
7. Adanya transparansi keuangan maupun non keuangan di PT. BPR Sinar Garuda Prima.
8. PT. BPR Sinar Garuda Prima telah memiliki rencana strategis dalam bentuk Rencana Bisnis Jangka Pendek, Menengah dan Panjang yang telah disusun oleh Bank dan dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
9. PT. BPR Sinar Garuda Prima telah melaporkan seluruh kewajiban pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau lembaga lain yang terkait dalam rangka transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank.

Demikian laporan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Magelang, 26 Januari 2023

PT. BPR Sinar Garuda Prima

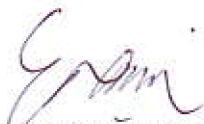


Anton Stefan Dwi K, SE
Direktur Utama



Satriya Sambodo, SE., MM
Direktur Kepatuhan

Mengetahui,



Dra. Erlina Sari Sutono
Komisaris Utama



Yosef Hening Krida M, Spd
Komisaris

Lembar Persetujuan

Laporan Tata Kelola BPR yang mengacu pada prinsip "TARIF" pada dasarnya merupakan proses kerja (*bussines process*) PT BPR Sinar Garuda Prima selama 1 (satu) tahun melalui pendekatan pemberdayaan seluruh Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di BPR Sinar Garuda Prima sehingga mengupayakan tidak terdapatnya data/informasi strategis dan signifikan yang tertinggal. Namun kemudian apabila dikemudian hari ditemukan data/informasi yang dilaporkan, maka akan segera dilakukan koreksi atau revisi terhadap laporan ini.

Magelang, 26 Januari 2023

Menyetujui,



Dra. Erlina Sari Sutono
Komisaris Utama



Anton Stefian Dwi K, SE
Direktur Utama